

Laporan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Banjir Awal Februari 2007 di Wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)



Kementerian Negara
Perencanaan
Pembangunan Nasional/
BAPPENAS
Februari 2007



KATA PENGANTAR

Akibat banjir yang diakibatkan hujan dengan curah tinggi sejak tanggal 31 Januari 2007, yang berlanjut hingga 9 Februari 2007, serta adanya banjir yang berasal dari daerah hulu (wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat) yang dibawa arus Sungai Ciliwung maupun anak-anak sungai Cisadane di wilayah Jabodetabek telah terjadi berbagai kerusakan dan kerugian baik pada sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Laporan ini menyajikan penilaian awal terhadap kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir tersebut. Penilaian ini menggunakan metode standar internasional untuk mengukur besarnya bencana. Laporan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dampak dari bencana ini kepada Pemerintah dan masyarakat internasional, serta dapat menjadi dasar untuk merancang program rekonstruksi dan pemulihan. Laporan ini dipersiapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP).

Perhitungan kerusakan dan kerugian ini dilaksanakan berdasarkan masukan dari berbagai sumber, Bakornas PB, Satkorlak PB dan Crisis Center Provinsi DKI Jakarta untuk besaran unit maupun harga satuan sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir, serta pengalaman penilaian kerusakan dan kerugian yang telah dilaksanakan untuk pasca bencana tsunami Aceh, pasca bencana gempa bumi Yogya-Jateng serta pasca bencana tsunami Pangandaran.

Bencana banjir di wilayah Jabodetabek ini memberikan peringatan yang sangat jelas betapa tingginya tingkat risiko bencana banjir yang dihadapi wilayah ini. Jelas dari penilaian yang dilakukan bahwa sistem penataan ruang wilayah hulu dan hilir di wilayah Jabodetabek, serta kondisi prasarana drainase di daerah perkotaan yang buruk merupakan penyebab utama luasnya cakupan wilayah genangan dari banjir Jabodetabek pada tahun ini. Rehabilitasi, rekonstruksi dan rencana-rencana pembangunan di masa mendatang sangat perlu memperhatikan hal ini dan kemudian diintegrasikan ke dalam langkah-langkah proaktif guna pencegahan bencana sejenis di masa yang akan datang secara lebih luas.

Diharapkan, laporan ini dapat membantu memberikan informasi mengenai potensi kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana banjir Jabodetabek Februari 2007 ini kepada berbagai pihak terkait, dan sekaligus sebagai masukan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi lebih lanjut.

Jakarta, 16 Februari 2007

H. Paskah Suzetta

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Ketua BAPPENAS

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Daftar Tabel..... | iv |
| Daftar Peta..... | iv |
| Daftar Gambar | iv |
| Daftar Kotak | iv |
| Ringkasan Eksekutif..... | v |
| Bagian I. Terjadinya Bencana Banjir | 1 |
| Banjir di Jabodetabek pada Awal Februari 2007 | 2 |
| Isu Kerentanan Terhadap Banjir di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya | 4 |
| Bagian II. Perkiraan Kerusakan dan Kerugian | 7 |
| Metode Penilaian Kerusakan dan Kerugian..... | 8 |
| Jumlah Korban | 8 |
| Perumahan..... | 12 |
| Infrastruktur | 15 |
| Perhubungan Darat..... | 16 |
| Energi | 17 |
| Pos dan Telekomunikasi | 17 |
| Air dan Sanitasi | 18 |
| Infrastruktur Pertanian..... | 18 |
| Sektor Sosial..... | 19 |
| Pendidikan | 20 |
| Kesehatan | 21 |
| Keagamaan | 22 |
| Sektor-sektor Produktif | 23 |
| Usaha/Industri Besar, Menengah dan Kecil | 24 |
| Perdagangan..... | 24 |
| Pariwisata | 25 |
| Pertanian, Peternakan dan Perikanan..... | 25 |
| Langkah Selanjutnya..... | 26 |
| Lintas Sektor | 27 |
| Pemerintahan..... | 28 |
| Keamanan dan Ketertiban | 28 |
| Keuangan dan Perbankan | 28 |
| Lingkungan Hidup | 28 |
| Masalah Utama | 29 |
| Rekomendasi Awal..... | 30 |
| Bagian III. Dampak Ekonomi dan Sosial..... | 31 |
| Penilaian Awal Potensi Dampak Banjir | 32 |
| Dampak Terhadap Perekonomian Regional dan Nasional | 34 |

| | |
|---|-----------|
| Bagian IV. Kesimpulan dan Rekomendasi..... | 37 |
| Kesimpulan | 38 |
| Rekomendasi..... | 39 |
| Rencana Tindak Jangka Pendek..... | 39 |
| Rencana Tindak Jangka Menengah..... | 41 |
| Rencana Tindak Jangka Panjang..... | 41 |

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel I.1 Kondisi Banjir di wilayah Jabodetabek..... | 2 |
| Tabel I.2 Jumlah Penduduk di wilayah Jabodetabek, Tahun 2005 | 5 |
| Tabel I.3 Luas Penggunaan Tanah di Provinsi DKI Jakarta..... | 6 |
| Tabel I.4 Luas Penggunaan Tanah di wilayah Bodetabek..... | 6 |
| Tabel II.1 Fluktuasi Jumlah Korban Banjir Jabodetabek..... | 9 |
| Tabel II.2 Jumlah Rumah Terendam Genangan Banjir di wilayah Jabodetabek | 13 |
| Tabel II.3 Klasifikasi Kerusakan Rumah Serta Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian..... | 14 |
| Tabel II.4 Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur..... | 16 |
| Tabel II.5 Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Dektor Pendidikan | 21 |
| Tabel II.6 Data Kerusakan Prasarana Kesehatan Puskesmas | 22 |
| Tabel II.7 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pada Sektor Ekonomi Produktif. | 24 |
| Tabel III.1 Ringkasan Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pascabanjir Jabodetabek Februari 2007..... | 33 |
| Tabel III.2 Produk Domestik Regional Bruto Jabodetabek..... | 34 |
| Tabel III.3 Estimasi PDRB Berdasarkan Besar Kerugian untuk Wilayah Jabodetabek. | 35 |

DAFTAR PETA

| | |
|--|----|
| Peta 1. Sebaran daerah Terkena Banjir di Jabodetabek..... | 10 |
| Peta 2. Sebaran daerah Terkena Banjir di Jabodetabek | 10 |
| Peta 3. Sebaran daerah Terkena Banjir di Jabodetabek | 11 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Diagram I.1 Pola Curah Hujan | 2 |
| Gambar I.2 Pola Pasang Air Laut | 3 |
| Foto II.3 Sampah sisa bangunan yang hanyut akibat banjir, Bukit Duri, Jakarta.. | 29 |

DAFTAR KOTAK

| | |
|--|---|
| Kotak 1: Mengukur Kerusakan dan Kerugian – Metodologi ECLAC..... | 8 |
|--|---|

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akibat banjir yang diakibatkan hujan dengan curah tinggi sejak tanggal 31 Januari 2007, yang berlanjut hingga 9 Februari 2007, serta adanya banjir yang berasal dari daerah hulu (wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat) yang dibawa arus Sungai Ciliwung maupun anak-anak sungai Cisadane ke wilayah Jakarta, telah terjadi berbagai kerusakan dan kerugian baik pada sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Berikut ini disampaikan hasil analisis dan perhitungan sementara kerusakan dan kerugian tersebut.

Perhitungan kerusakan dan kerugian ini dilaksanakan berdasarkan masukan dari berbagai sumber, Bakornas PB, Satkorlak PB dan Crisis Center Provinsi DKI Jakarta untuk besaran unit maupun harga satuan sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir, serta pengalaman penilaian kerusakan dan kerugian yang telah dilaksanakan untuk pasca bencana tsunami Aceh, pasca bencana gempa bumi Yogya-Jateng serta pasca bencana tsunami Pangandaran.

Dengan curah hujan yang relatif berkurang sejak Jumat 9 Februari 2007 debit dan ketinggian air pada beberapa pintu air dan bendung mengalami penurunan. Beberapa areal genangan air telah surut, sehingga sebagian pengungsi telah meninggalkan tempat pengungsian, kecuali para korban yang rumahnya masih tergenang atau telah hanyut terbawa air.

Laporan perhitungan sementara terhadap kerusakan dan kerugian ini telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi lapangan yang dilaporkan oleh Satkorlak PB dan Crisis Center Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya, serta kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah di wilayah Jabodetabek mulai tanggal 5 Februari hingga 14 Februari 2007.

KORBAN SERTA KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA

Sampai dengan posisi tanggal 14 Februari 2007 pukul 20.00 WIB, berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Bakornas dan Departemen Sosial, tercatat korban jiwa akibat bencana banjir sebanyak 79 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, dan 2.349 orang pengungsi di DKI Jakarta, 106.406 pengungsi di Provinsi Jawa Barat, serta 52 orang pengungsi di Provinsi Banten. Dengan demikian sebagian pengungsi sudah meninggalkan lokasi pengungsian kembali ke rumahnya.

Salah satu masalah pasca banjir yang ada saat ini yaitu penyakit yang dialami oleh para korban, di antaranya demam, ISPA, diare, penyakit kulit dan *leptospirosis*. Tercatat di RS Koja total pasien rawat inap dan rawat jalan mencapai lebih dari 865 pasien, diantaranya 285 pasien rawat inap karena terserang diare. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Depok, setidaknya selama banjir telah tercatat 1.500 orang yang berobat, antara lain karena terserang ISPA, gatal-gatal, batuk dan pilek. Departemen Kesehatan telah

memberikan bantuan pelayanan kesehatan di 502 pos kesehatan, obat-obatan, pengoperasian puskesmas keliling (Pusling) setiap harinya beserta 43 tim paramedis, Selain itu, Departemen Kesehatan juga terus memberikan bantuan obat-obatan, makanan bayi, mie instan, dan makanan siap saji kepada pengungsi korban banjir.

Sementara itu, di bidang sarana dan prasarana publik, serta fasilitas perekonomian yang mengalami kerusakan akibat banjir, dapat dicatat diantaranya meliputi:

- Pemadaman listrik dari 2.465 gardu distribusi karena terendam banjir, pada Senin malam 12 Februari 2007 dilaporkan pendistribusian listrik di kawasan Jakarta dan Tangerang ini telah pulih. Akan tetapi pemulihan ini belum termasuk perbaikan meteran listrik pelanggan yang mengalami kerusakan. PLN tidak akan membebani biaya kepada pelanggan untuk perbaikan dan penggantian meteran listrik ini.
- Dari 5 Instalasi Pengolah Air (IPA) di wilayah DKI Jakarta yang pompa, intake dan genset nya terendam air, pada saat ini IPA Pulo Gadung dan IPA Pejompongan I dan IPA Pejompongan II yang sudah normal kembali. Selebihnya, yaitu IPA Buaran dan IPA Cilandak masih dalam tahap perbaikan. Direncanakan dalam waktu 2 minggu sudah normal kembali. Pasokan air yang berasal dari PT TPJ sudah pulih seluruhnya sedangkan dari PT Palyja pemulihan penyediaan air minum mencapai 68%.
- Dengan hanyutnya jembatan dan pipa distribusi utama di Kedung Halang-Bogor yang mengakibatkan air sebesar 400 liter/detik dari PDAM Bogor sudah 1 minggu tidak dapat didistribusikan, namun mulai Senin 12 Februari 2007 sebagian besar pelanggan sudah mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM Kabupaten Bogor. Kendala yang dihadapi oleh PDAM Kabupaten Bogor yaitu pembangunan kembali jembatan untuk pipa distribusi, sehingga menyebabkan pelayanan kepada pelanggan belum pulih seperti semula.
- Dari 49 Puskesmas dan 3 rumah sakit yang sebelumnya tidak berfungsi karena terendam air, saat ini hampir seluruhnya telah mulai beroperasi.
- Dari 240 unit sekolah terendam banjir, walaupun saat ini kegiatan belajar mengajar sudah mulai berjalan, namun kondisi gedung masih memerlukan perbaikan.
- Di sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah), terutama industri garmen serta industri makanan dan minuman mengalami kerusakan alat produksi karena terendam air, termasuk bahan baku.

Selain itu, juga dinilai kerusakan yang terjadi terhadap prasarana dan sarana lainnya, yang antara lain mencakup drainase kota, prasarana peribadatan, prasarana dan sarana perdagangan; termasuk dalam memperkirakan kerugian yang dialami sektor perekonomian di wilayah Jabodetabek.

Sebagai respon terhadap bencana banjir ini, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Daerah se-Jabodetabek juga telah merencanakan untuk melakukan pembersihan sampah-sampah yang berasal dari banjir pada beberapa jalan

utama yang sudah tidak tergenang air, serta pembersihan rumah-rumah yang terkena banjir secara masal, dengan dukungan dari pihak dunia usaha dan masyarakat.

PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Untuk status sampai dengan 14 Februari 2007, dengan memperhitungkan jenis prasarana dan sarana yang telah diperoleh data dan informasinya, maka nilai kerusakan dan kerugian terhadap aset yang terkena banjir, baik aset milik pemerintah, aset dunia usaha dan aset masyarakat **diperkirakan senilai Rp5,16 triliun**. Selain itu, berdasarkan perkiraan yang dilakukan oleh APINDO dan penilaian yang dilakukan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), diperkirakan kerugian ekonomi yang harus ditanggung selama sekitar 1 (satu) minggu kejadian bencana banjir di wilayah Jabodetabek sebesar US\$400 juta (sekitar Rp3,6 triliun), yang mencakup kerugian dan kerusakan yang dialami perumahan, kendaraan bermotor, bangunan industri dan fasilitas perdagangan. Nilai ini tidak hanya karena kerusakan aset fisik akan tetapi juga karena '*opportunity loss*' atau hilangnya peluang karena aktivitas, terutama kegiatan ekonomi, yang tidak dapat dilakukan akibat banjir. Nilai perkiraan sebesar US\$400 juta tersebut juga secara resmi dikemukakan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 13 Februari 2007 di beberapa media massa.

Dalam melakukan penilaian kerusakan dan kerugian, beberapa asumsi dan data yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

- Kerugian yang dialami oleh penghuni rumah permanen, karena kerusakan furniture dan perabot rumah. Stimulan pembangunan rumah non-permanen yang rusak, diasumsikan 75% dari rumah terendam banjir merupakan rumah permanen sederhana yang mengalami rusak berat, dengan satuan harga untuk penggantian rumah permanen sederhana yang rusak berat sebesar Rp20 juta per unit; sementara untuk rumah non-permanen yang hancur atau hanyut terbawa air banjir diberikan kompensasi sebesar Rp10 juta per unit, dan untuk rumah permanen yang mengalami rusak ringan diberikan kompensasi sebesar Rp5 juta per unit rumah. Selain itu, untuk lingkungan permukiman yang rusak, diasumsikan sekitar 15% dari total nilai kerusakan perumahan yang dihitung.
- Perkiraan terhadap perbaikan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar akibat rusaknya gedung sekolah senilai Rp. 14,17 miliar.
- Perkiraan kerusakan dan kerugian jalan raya dan kereta api Rp601,39 miliar, termasuk berkurangnya pendapatan PT KAI, kerugian pengelola angkutan umum serta Trans Jakarta pada saat tidak dapat beroperasi. Berdasarkan informasi selama satu minggu diperkirakan PT. KAI mengalami *opportunity loss* dari pendapatan penjualan karcis senilai Rp. 1 - 1,5 miliar/hari dan perbaikan kerusakan, dengan total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 23,4 miliar.

- Kerusakan infrastruktur sungai yang diperkirakan senilai Rp. 383,87 miliar, karena rusaknya tanggul pada 13 sungai dan Banjir kanal Timur dan Barat, tebing kali Ciliwung dan pintu air.
- Perkiraan kerugian BUMN selama seminggu banjir di wilayah Jabodetabek, seperti PLN yang merugi senilai Rp. 17 miliar per hari; PT. Telkom yang merugi senilai Rp. 18 miliar; dan PT. Pertamina akibat terendamnya depo BBM Plumpang sebesar Rp. 100 Milyar.
- Sementara dari pihak BUMD, perkiraan kerusakan dan kerugian PT TPJ dan PT Palyja di DKI Jakarta serta PDAM Kabupaten Bogor senilai Rp. 14,4 milyar
- Perkiraan kerugian sektor UKM dan koperasi karena tidak beroperasi transaksi sebesar rata-rata Rp 781 juta per hari.

RENCANA TINDAK LANJUT

Penilaian atas kerusakan dan kerugian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada seluruh instansi pemerintah (Pusat dan daerah), legislatif, dan masyarakat luas, serta untuk bahan penilaian kebutuhan (*need assessment*) dan penyusunan rencana-rencana pemulihan, rehabilitasi maupun rekonstruksi pada tahap selanjutnya.

Pemerintah Pusat akan senantiasa melakukan asistensi dan kerjasama dengan Pemda DKI Jakarta dan pemerintah daerah lain yang terkait guna dapat memperkirakan kerugian dan kerusakan yang terkait dengan berbagai aset publik maupun aset masyarakat yang rusak akibat bencana banjir ini.

Untuk tahap selanjutnya, Pemerintah bersama seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek akan melakukan koordinasi yang lebih intensif di dalam mewujudkan wilayah Jabodetabek yang bebas dari bencana banjir. Untuk itu, telah dimulai berbagai upaya yang sifatnya koordinatif di dalam penanggulangan banjir wilayah Jabodetabek secara terpadu, mulai dari wilayah hulu sampai hilir, dengan mendayagunakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Bodetabek dan Puncak Cianjur (Bodetabek Punjur).

Selain itu, juga akan terus diupayakan pembenahan dan penyelesaian berbagai sarana dan prasarana sumber daya air yang berada di hilir, termasuk pembenahan sistem drainase serta penyelesaian pembangunan banjir kanal timur (BKT) yang selama ini tertunda penyelesaiannya, serta revitalisasi berbagai situ-situ dan waduk resapan yang selama ini diabaikan peranan pentingnya di dalam pencegahan bencana banjir di wilayah Jabodetabek.



BAGIAN I

TERJADINYA BENCANA BANJIR

BANJIR DI JABODETABEK PADA AWAL FEBRUARI 2007

Hujan yang turun semenjak tanggal 29 Januari hingga 2 Februari 2007 adalah awal dari bencana banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan pengamatan cuaca oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, tingginya curah hujan disebabkan oleh :

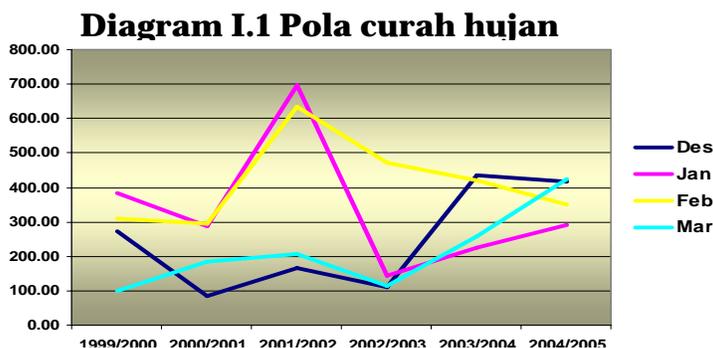
- Adanya daerah dengan tekanan udara rendah di Australia bagian utara;
- Adanya daerah pertemuan angin (ITCZ) pada posisi di sekitar laut Jawa hingga Laut Banda;
- Naiknya suhu muka laut sepanjang ITCZ meningkatkan pertumbuhan awan hujan
- Adanya kenaikan suhu permukaan laut sebesar $0.5^{\circ} - 1.0^{\circ} \text{ C}$ di wilayah perairan Indonesia, yang mengakibatkan naiknya potensi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia

Curah hujan kumulatif di wilayah Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan genangan dengan variasi ketinggian 30 cm - 300 meter diberbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya, dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel I.1
Kondisi Banjir di wilayah Jabodetabek

| KOMPONEN | DKI Jakarta | Banten (Kab. & Kota Tangerang) | Jawa Barat (Depok, Bekasi, Bogor) | Total Jabodetabek |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| Luas Area (km ²) | 649.71 | 1,294.38 | 3,833.21 | 5,777.30 |
| Area genangan (km ²) | 454.8 | 221 | 250 | 926 |
| Persentasi area | 70 | 17.1 | 6.5 | 16 |
| Populasi | 9,041,605 | 4,862,193 | 10,267,802 | 24,171,600 |
| Jumlah Pengungsi (5-6 Feb) | 276.333 | 42.278 | 271.796 | 590.407 |
| Jumlah Meninggal (12 Feb) | 48 | 13 | 18 | 79 |

Sumber : Satkorlak Provinsi DKI Jakarta, Crisis Center, Februari 2007 dan data BPS 2005.



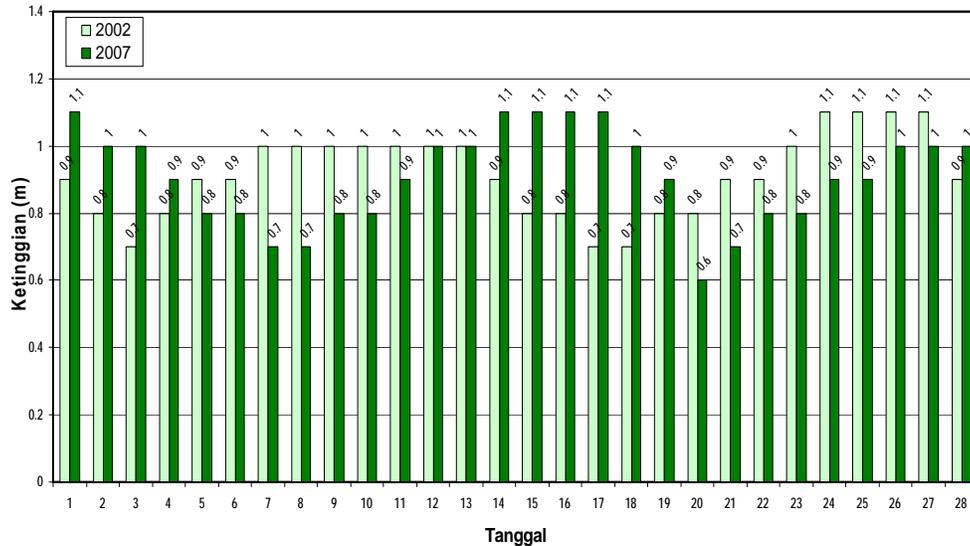
Sumber : BMG, Februari 2007

Terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek terkait erat dengan pola curah hujan pada bulan Desember – Maret dengan tinggi curah hujan 300 – 400 mm, yang diamati semenjak tahun 1999/2000 hingga 2004/2005.

Selain curah hujan yang tinggi, banjir terkait erat dengan pola ketinggian pasang air laut di Tanjung Priok pada bulan Februari tahun 2002 dan 2007 dengan rata-rata ketinggian 1 meter.

Gambar I.2. Pola pasang air laut

Prakiraan Pasang Laut Tanjung Priok Februari 2002 dan 2007



Sumber : Badan Meteorologi dan dan Geofisika, Februari 2007

Respon pemerintah dan kelompok masyarakat dalam tahap tanggap darurat adalah :

- BAKORNAS, TNI, POLRI dan Departemen Sosial mengerahkan personil dan perlengkapan untuk melaksanakan evakuasi
- SATKORLAK dan SATLAK menyalurkan bantuan kepada kepada pengungsi berupa obat dan makanan, air bersih, peralatan sanitasi, desinfektan dan genset
- Mendirikan 60 Posko Penanggulangan Bencana pada 5 (lima) wilayah Provinsi DKI Jakarta
- Masyarakat internasional menyalurkan bantuan berupa uang, obat dan makanan.

ISU KERENTANAN TERHADAP BANJIR DI WILAYAH JAKARTA DAN SEKITARNYA

Banjir merupakan peristiwa yang akrab bagi kota-kota di Pantai utara Jawa. Jakarta yang dibangun oleh Jan Pieters Z. Coen di awal abad ke 17 dengan konsep kota air (waterfront city), merupakan kota yang akrab dengan permasalahan banjir. Pada waktu didirikan di tahun 1619 pada lokasi kota pelabuhan Sunda Kalapa, Batavia dirancang dengan kanal-kanal seperti kota Amsterdam atau kota-kota lain di Belanda. Secara historis semenanjung dan Teluk Jakarta memang rawan banjir akibat peningkatan debit air sungai-sungai Cisadane, Angke, Ciliwung, Bekasi dan Citarum pada musim hujan. Pertumbuhan permukiman dan perkotaan yang tak terkendali disepanjang dan disekitar daerah aliran sungai, tidak berfungsinya kanal-kanal dan tiadanya sistem drainase yang memadai mengakibatkan semakin terhambatnya aliran air ke laut, yang mengakibatkan Jakarta dan kawasan di sepanjang daerah aliran sungai menjadi sangat rentan terhadap banjir. Berdasarkan dokumentasi yang tersedia, Kota Jakarta dilanda banjir pada tahun 1621, 1654 dan 1918, kemudian pada tahun 1976, 1996, 2002 dan 2007. Banjir di Jakarta yang terjadi pada tahun 1996 selain menggenangi hampir seluruh penjuru kota juga menjadi tragedi nasional yang menjadi perhatian dunia. Banjir besar ini dipercaya sebagai banjir lima tahunan yang akan berulang setiap lima tahun. Pada awal 2002 banjir melanda Jakarta dan sekitarnya dan pada awal 2007 banjir kembali melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan cakupan wilayah genangan yang lebih luas.

Wilayah daratan Provinsi DKI Jakarta meliputi areal seluas 650 km² dengan 40% wilayahnya mempunyai elevasi antara +0,8 m s.d. +1,2 m, dan dialiri 13 (tigabelas) sungai besar dan kecil. Terjadinya banjir di Jakarta, pada dasarnya disebabkan oleh:

- luapan air sungai karena aliran air dari hulu yang melebihi kapasitas sungai
- tidak memadainya fungsi saluran drainase serta semakin berkurangnya daerah resapan untuk Jakarta
- sulitnya pemeliharaan sungai karena sebagian bantaran sungai telah digunakan sebagai permukiman
- pola pengelolaan sampah yang buruk dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan
- kerusakan lingkungan daerah tangkapan air di bagian hulu sungai akibat pemanfaatan yang kurang terkendali;

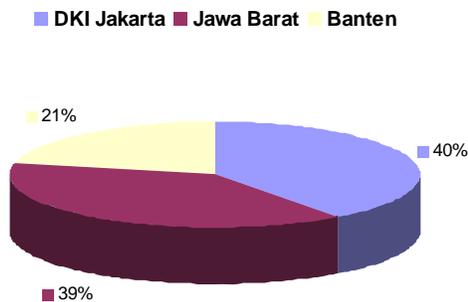
sehingga wilayah kota Jakarta daratan rawan terhadap banjir.

Jabodetabek adalah sebuah dari Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, yaitu sebuah kawasan metropolitan Jakarta dan sekitarnya. Kawasan Jabodetabek secara geografis mencakup 8 (delapan) wilayah administrasi dengan gambaran demografi sebagai berikut :

Tabel I.2
Jumlah penduduk di wilayah Jabodetabek, tahun 2005

| No | Nama Wilayah | Luas (km2) | Jumlah kecamatan | Jumlah penduduk | Kepadatan (jiwa/km2) |
|------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| I | Provinsi DKI Jakarta | 661.52 | 44 | 9,041,605 | 13,668 |
| 1 | Kota Jakarta Utara | 142.20 | 6 | 1,446,728 | 10,174 |
| 2 | Kota Jakarta Pusat | 47.9 | 8 | 861,531 | 17,986 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | 187.73 | 10 | 2,393,788 | 12,751 |
| 4 | Kota Jakarta Barat | 126.15 | 8 | 2,322,232 | 18,408 |
| 5 | Kota Jakarta Selatan | 145.73 | 10 | 1,995,214 | 13,691 |
| | <i>DKI Jakarta daratan</i> | 649.71 | 42 | 9,019,493 | 13,882 |
| 6 | Kab.Kepulauan Seribu | 11.81 | 2 | 22,112 | 1,872 |
| II | Provinsi Jawa Barat | 3,833.21 | 87 | 8,893,942 | 2,320 |
| 1 | Kota Depok | 212.24 | 6 | 1,373,860 | 6,473.14 |
| 2 | Kota Bogor | 108.98 | 6 | 844,778 | 7,751.68 |
| 3 | Kabupaten Bogor | 2,237.09 | 40 | 4,100,934 | 1,832.49 |
| 4 | Kota Bekasi | 209.55 | 12 | 1,994,850 | 9,519.69 |
| 5 | Kabupaten Bekasi | 1,065.35 | 23 | 1,953,380 | 1,833.56 |
| III | Provinsi Banten | 1,294.38 | 39 | 4,862,193 | 3,756 |
| 1 | Kota Tangerang | 184 | 13 | 1,537,244 | 8,355 |
| 2 | Kabupaten Tangerang | 1,110.38 | 26 | 3,324,949 | 2,994 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2005.



Berdasarkan data statistik 2005, sekitar 22,8 juta penduduk tinggal di wilayah Jabodetabek, dengan komposisi penduduk DKI Jakarta sejumlah 9,0 juta jiwa, penduduk Provinsi Jawa Barat sejumlah 8,89 juta, dan Provinsi Banten 4,8 juta. Pertumbuhan penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan laju pertumbuhan tahun 2000 – 2005 adalah rata-

rata 1,09% dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di wilayah Kota Jakarta Barat (4,3%), namun pada saat yang sama terdapat penurunan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Jakarta Pusat (0,72%). Pertumbuhan penduduk di Jabodetabek dipacu oleh laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat sebesar rata-rata 2 % per tahun semenjak tahun 2002.

Luas wilayah Provinsi Jakarta adalah 66,152 hektar, dan luas daerah terbangun di wilayah daratan Jakarta telah mencapai 85% dari luas wilayah daratan. Penggunaan tanah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data statistik tahun 2005 adalah :

Tabel I.3
Luas penggunaan tanah di Provinsi DKI Jakarta

| No | Wilayah | Perumahan | Industri | Perkantoran dan Pergudangan | Taman | Lainnya | Total |
|----|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | Kota Jakarta Selatan | 10,408.92 | 184.86 | 1,929.93 | 224.95 | 1,824.34 | 14,573.00 |
| 2 | Kota Jakarta Timur | 13,672.56 | 895.1 | 1,997.55 | 259.54 | 1,948.25 | 18,773.00 |
| 3 | Kota Jakarta Pusat | 2,915.40 | 71.59 | 1,154.53 | 197.13 | 451.35 | 4,790.00 |
| 4 | Kota Jakarta Barat | 9,068.04 | 403.39 | 1,384.99 | 248.19 | 1,510.39 | 12,615.00 |
| 5 | Kota Jakarta Utara | 7,780.07 | 1,768.19 | 1,683.94 | 155.08 | 2,832.72 | 14,220.00 |
| | Jakarta daratan | 43,844.99 | 3,323.13 | 8,150.94 | 1,084.89 | 8,567.05 | 64,971.00 |
| 6 | Kab. Kepulauan Seribu | 351.12 | 235.87 | 111.44 | 0 | 482.57 | 1,181.00 |
| | Provinsi DKI Jakarta | 44,196.11 | 3,559.00 | 8,262.38 | 1,084.89 | 9,049.62 | 66,152.00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2005.

Penggunaan tanah di wilayah BODETABEK berdasarkan data tahun 2005 menggambarkan bahwa Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang di sebelah barat Jakarta menunjukkan pertumbuhan daerah terbangun yang tinggi.

Tabel I.4
Luas penggunaan tanah di wilayah Bodetabek tahun 2005

| No | Wilayah | Terbangun | Tidak Terbangun | Total | % - daerah terbangun |
|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|
| I | Provinsi Jawa Barat | 75,822 | 395,729 | 471,551 | 16.08% |
| 1 | Kota Depok | 8,599 | 11,430 | 20,029 | 42.93% |
| 2 | Kota Bogor | 5,198 | 6,656 | 11,854 | 43.85% |
| 3 | Kabupaten Bogor | 28,140 | 271,827 | 299,967 | 9.38% |
| 4 | Kota Bekasi | 12,872 | 8,471 | 21,343 | 60.31% |
| 5 | Kabupaten Bekasi | 21,013 | 97,345 | 118,358 | 17.75% |
| II | Provinsi Banten | 93,776 | 46,040 | 139,816 | 67.07% |
| 1 | Kota Tangerang | 14,714 | 1,601 | 16,315 | 90.19% |
| 2 | Kabupaten Tangerang | 79,062 | 44,439 | 123,501 | 64.02% |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2005.



BAGIAN II

PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN

METODE PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Kotak 1: Mengukur Kerusakan dan Kerugian – Metodologi ECLAC

Untuk mengukur kerusakan dan kerugian, tim gabungan yang terdiri dari BAPPENAS, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta mitrainternasional menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC). Metodologi ECLAC pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1970-an dan telah dimodifikasi dan ditingkatkan melalui aplikasi selama lebih dari tiga dekade dalam konteks pasca-bencana di seluas dunia.

Metodologi ini menghasilkan perkiraan pendahuluan terhadap dampak atas aset fisik yang harus diperbaiki dan diganti, serta terhadap aliran-aliran yang tidak akan diproduksi sampai aset diperbaiki dan dibangun.

Perkiraan itu menganalisis tiga aspek utama:

- **Kerusakan** (dampak langsung) memaksudkan dampak atas aset, saham, properti, yang dinilai dengan harga unit penggantian (bukan rekonstruksi) yang disepakati. Perkiraan itu harus memperhitungkan tingkat kerusakan (apakah aset masih bisa dipulihkan/diperbaiki, atau sudah sama sekali hancur).
- **Kerugian** (dampak tidak langsung) memaksudkan aliran-aliran yang akan terkena dampak, seperti pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah, dll selama periode waktu hingga aset dipulihkan. Semua itu akan dijumlah berdasarkan nilai sekarang. Penentuan periode waktu sangat penting. Jika pemulihan berlangsung lebih lama daripada yang diharapkan, seperti dalam kasus Aceh, kerugian bisa meningkat secara signifikan.
- **Efek ekonomi** (kadang-kadang disebut dampak sekunder) mencakup dampak fiskal, dampak pertumbuhan PDB, dll. Analisis ini juga bisa diterapkan pada tingkat sub-nasional.

JUMLAH KORBAN

Hujan yang terjadi secara terus menerus dengan intensitas tinggi pada tanggal 1 hingga 5 Februari 2007 dan kemudian menurun mulai 8 Februari 2007 di wilayah Jabodetabek menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang cukup tinggi. Berbeda dengan sifat bencana gempa bumi atau tsunami, maka korban akibat banjir ini, terutama pengungsi, berfluktuasi dari hari ke hari sesuai dengan kondisi air yang menggenangi rumah dan lingkungannya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari dari satkorlak PBP DKI Jakarta dan berbagai media masa sampai dengan tanggal 12 Februari 2007 terlihat adanya fluktuasi jumlah korban banjir. Sejalan dengan intensitas curah hujan, pengungsi terbanyak yaitu pada tanggal 5-6 Februari 2007 dengan jumlah lebih dari 590 ribu orang di wilayah Jabodetabek, dan kemudian menurun menjadi sejumlah 397.304 jiwa pada periode tanggal 7-8 Februari 2007 .

Namun pada periode 9-10 february 2007 jumlah pengungsi cenderung bertambah terutama di wilayah Bodetabek, walaupun pengungsi di wilayah DKI Jakarta secara signifikan telah turun lebih dari 50% dibandingkan pada awal Februari 2007. Hingga tanggal 12 Februari 2007 jumlah pengungsi di

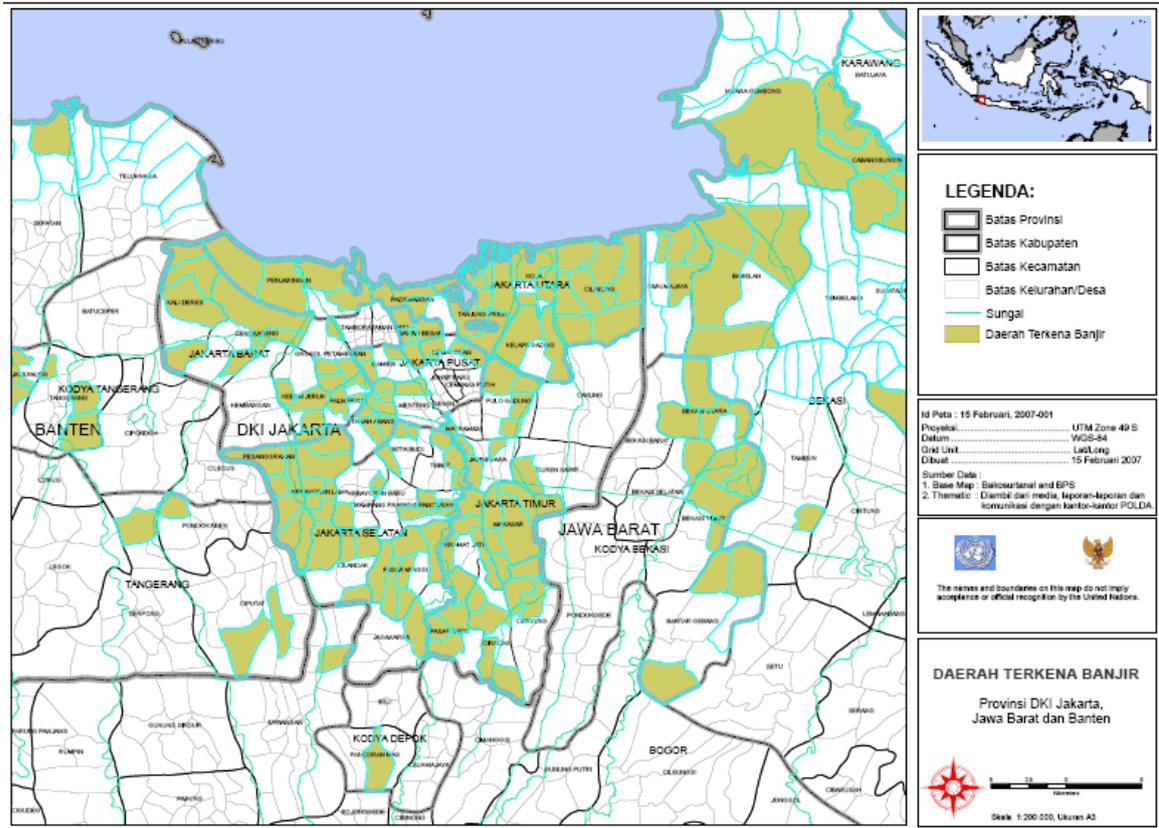
wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten belum menunjukkan penurunan yang signifikan, namun di sisi lain, jumlah korban meninggal bertambah, antara lain karena kerentanan fisik selama berada di tempat pengungsian. Tabel II.1 memperlihatkan fluktuasi jumlah korban banjir berdasarkan wilayah di Jabodetabek, sebagai berikut :

Tabel II.1
Fluktuasi jumlah korban banjir Jabodetabek

| Wilayah | Status 5 - 6 Februari 2007 | | Status 7 - 8 Februari 2007 | | Status 9 - 10 Februari 2007 | | Status 12 Februari 2007 | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Meninggal (orang) | Mengungsi (orang) | Meninggal (orang) | Mengungsi (orang) | Meninggal (orang) | Mengungsi (orang) | Meninggal (orang) | Mengungsi (orang) |
| Provinsi DKI Jakarta | 36 | 276,333 | 41 | 185,011 | 48 | 122,660 | 48 | 57,994 |
| 1 Jakarta Pusat | 3 | 41,821 | 3 | 9,981 | 3 | 3,260 | 3 | 2,940 |
| 2 Jakarta Utara | 10 | 20,947 | 11 | 34,887 | 11 | 21,744 | 11 | 5,843 |
| 3 Jakarta Barat | 7 | 46,779 | 10 | 46,977 | 17 | 51,250 | 17 | 31,796 |
| 4 Jakarta Selatan | - | 61,796 | 1 | 42,767 | 1 | 25,826 | 1 | 6,026 |
| 5 Jakarta Timur | 16 | 104,990 | 16 | 50,399 | 16 | 20,580 | 16 | 11,389 |
| Provinsi Jawa Barat | 18 | 271,796 | 18 | | 18 | 240,813 | 18 | 149,450 |
| 1 Kota Bogor | 7 | 372 | 7 | NA | 7 | NA | 7 | 1,994 |
| 2 Kabupaten Bogor | | | | | | | | 7,139 |
| 3 Kota Depok | 3 | - | 3 | NA | 3 | NA | 3 | 4,323 |
| 4 Kota Bekasi | 4 | 256,424 | 4 | NA | 4 | NA | 4 | 36,056 |
| 5 Kabupaten Bekasi | 4 | 15,000 | 4 | NA | 4 | NA | 4 | 99,938 |
| Provinsi Banten | 7 | 42,278 | 9 | | 11 | 37,511 | 13 | 15,759 |
| 1 Kota Tangerang | 2 | 29,697 | 4 | NA | 4 | NA | | 10,258 |
| 2 Kabupaten Tangerang | 5 | 12,581 | 5 | NA | 7 | NA | | 5,501 |
| TOTAL | 61 | 590,407 | 68 | 397,304 | 77 | 400,984 | 79 | 223,203 |

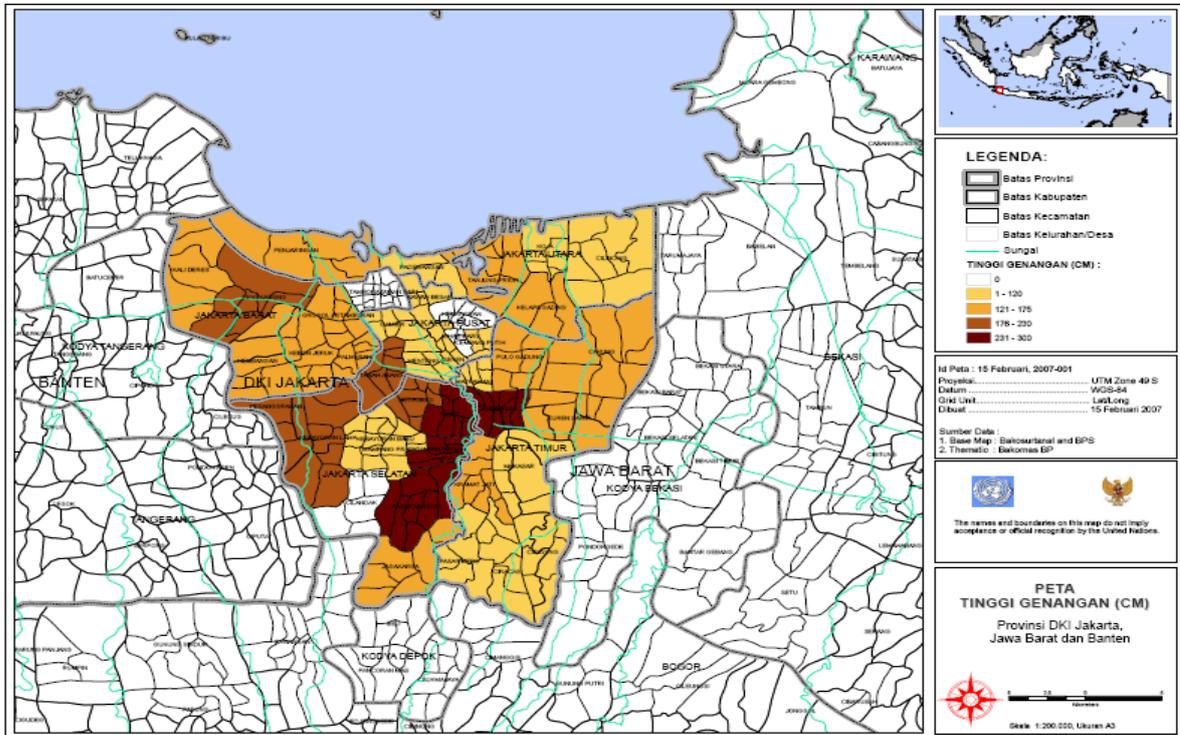
Sumber: Satkorlak PBP Provinsi DKI Jakarta dan Media Masa, Februari 2007

Peta I.1: Sebaran Daerah Terkena Banjir di Jabodetabek



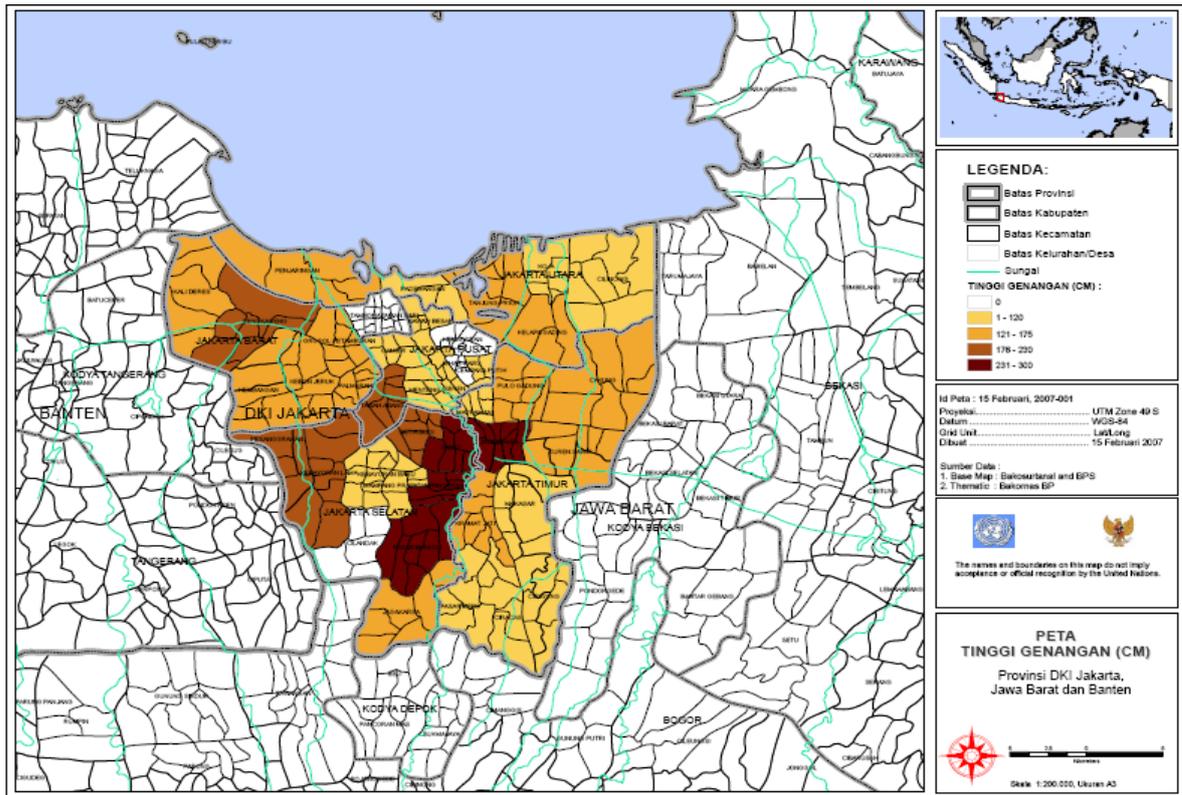
Sumber: Bakornas PB-UNDP, 14 Februari 2007

Peta I.2: Sebaran Daerah Terkena Banjir di Jabodetabek



Sumber: Bakornas PB-UNDP, 14 Februari 2007

Peta I.3: Sebaran Daerah Terkena Banjir di Jabodetabek



Sumber: Bakornas PB-UNDP, 14 Februari 2007



PERUMAHAN

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Satkorlak PB Provinsi Jawa Barat serta informasi dari media masa secara *on line*, untuk status sampai dengan tanggal 8 Februari 2007, diperkirakan jumlah rumah yang rusak dan terendam di wilayah Jabodetabek mencapai 144.914 unit .

Validasi data kondisi secara rinci masih belum diperoleh, baik untuk tingkat kerusakan maupun status bangunan rumahnya, dalam hal ini bangunan permanen dan non-permanen, sehingga diperlukan adanya beberapa asumsi untuk melakukan perhitungan nilai kerugian dan kerusakan bangunan rumah serta infrastruktur dasar lingkungan perumahan.

Tabel II.2
Jumlah rumah terendam genangan banjir
di wilayah Jabodetabek

| Propinsi / Wilayah | Rumah terendam (unit) |
|-----------------------|--------------------------|
| Provinsi DKI Jakarta | 89,770 |
| 1 Jakarta Pusat | 15,289 |
| 2 Jakarta Utara | 8,207 |
| 3 Jakarta Barat | 6,627 |
| 4 Jakarta Selatan | 23,297 |
| 5 Jakarta Timur | 36,350 |
| Provinsi Jawa Barat | 52,972 |
| 1 Kota Bogor | 453 |
| 2 Kabupaten Bogor | 589 |
| 3 Kota Depok | 6,083 |
| 4 Kota Bekasi | 9,624 |
| 5 Kabupaten Bekasi | 36,223 |
| Provinsi Banten | 3,000 |
| 1 Kota Tangerang | |
| 2 Kabupaten Tangerang | |
| TOTAL | 145,742 |

Sumber:

Satkorlak PB Provisnasi Jawa Barat dan media center

Karena keterbatasan data yang lebih rinci, maka untuk memperkirakan nilai kerusakan dan kerugian diperlukan beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut:

1. Komposisi rumah yang hilang, rumah rusak berat dan rusak ringan, berturut-turut yaitu sebesar 10%, 15% dan 75% dari total rumah yang terendam banjir.
2. Nilai kerusakan dan kerugian bangunan rumah beserta furniture dan peralatan rumah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kerusakan dan kerugian untuk rumah hilang diasumsikan sebesar Rp. 10 juta/unit, dengan pertimbangan bahwa rumah yang hilang tersapu banjir pada umum merupakan rumah non permanen yang berada di bantaran sungai.
 - b. Nilai kerusakan dan kerugian untuk rumah rusak berat sebesar Rp. 20 juta/unit, nilai ini termasuk untuk memperbaiki rumah dan kerusakan terhadap furniture serta peralatan rumah;
 - c. Nilai kerusakan dan kerugian untuk rumah rusak ringan sebesar Rp. 5 juta/ unit, termasuk perkiraan perbaikan furniture dan peralatan.

Berdasarkan asumsi tersebut, berikut ini disajikan jumlah rumah setiap jenis kerusakan beserta perkiraan nilai kerusakan dan kerugian, dengan jumlah total sebesar Rp. 1,13 Triliun.

Kerusakan dan kerugian untuk sektor perumahan tidak hanya terbatas pada bangunan rumah penduduk korban bencana, akan tetapi juga harus dipertimbangkan kerusakan dan kerugian terhadap sarana dan prasarana lingkungan perumahan. Dengan pertimbangan keterbatasan data yang rinci yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait, maka secara umum diasumsikan bahwa nilai kerusakan dan kerugian untuk sarana dan prasarana perumahan yaitu sebesar 15% dari total kerusakan dan kerugian rumah. Dengan demikian maka perkiraan total kerusakan dan kerugian sektor perumahan yaitu di wilayah Jabodetabek yaitu sebesar Rp. 1, 3 Triliun.

Tabel II.3
Klasifikasi Kerusakan Rumah serta Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian

| Propinsi / Wilayah | Klasifikasi Kerusakan Rumah Terendam dan Perkiraan Nilai | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Hilang | | Rusak Berat | | Rusak Ringan | | Total | |
| | Unit | Rp. 10 jt /unit | Unit | Rp. 20 jt / unit | Unit | Rp. 5jt / unit | unit | Rp juta |
| Provinsi DKI Jakarta | 8,977 | 89,770 | 13,466 | 269,310 | 67,328 | 336,638 | 89,770 | 695,718 |
| 1 Jakarta Pusat | 1,529 | 15,289 | 2,293 | 45,867 | 11,467 | 57,334 | 15,289 | 118,490 |
| 2 Jakarta Utara | 821 | 8,207 | 1,231 | 24,621 | 6,155 | 30,776 | 8,207 | 63,604 |
| 3 Jakarta Barat | 663 | 6,627 | 994 | 19,881 | 4,970 | 24,851 | 6,627 | 51,359 |
| 4 Jakarta Selatan | 2,330 | 23,297 | 3,495 | 69,891 | 17,473 | 87,364 | 23,297 | 180,552 |
| 5 Jakarta Timur | 3,635 | 36,350 | 5,453 | 109,050 | 27,263 | 136,313 | 36,350 | 281,713 |
| | | - | | | | | | |
| Provinsi Jawa Barat | 5,297 | 52,972 | 7,946 | 158,916 | 39,729 | 198,645 | 52,972 | 410,533 |
| 1 Kota Bogor | 45 | 453 | 68 | 1,359 | 340 | 1,699 | 453 | 3,511 |
| 2 Kabupaten Bogor | 59 | 589 | 88 | 1,767 | 442 | 2,209 | 589 | 4,565 |
| 3 Kota Depok | 608 | 6,083 | 912 | 18,249 | 4,562 | 22,811 | 6,083 | 47,143 |
| 4 Kota Bekasi | 962 | 9,624 | 1,444 | 28,872 | 7,218 | 36,090 | 9,624 | 74,586 |
| 5 Kabupaten Bekasi | 3,622 | 36,223 | 5,433 | 108,669 | 27,167 | 135,836 | 36,223 | 280,728 |
| | | - | | | | | | |
| Provinsi Banten | 300 | 3,000 | 450 | 9,000 | 2,250 | 11,250 | 3,000 | 23,250 |
| 1 Kota Tangerang | | - | | - | | - | | - |
| 2 Kabupaten Tangerang | | - | | - | | - | | - |
| | | - | | - | | - | | - |
| TOTAL | 14,574 | | 21,861 | | 109,307 | | 145,742 | 1,129,501 |

Sumber:

Satkorlak PB Provinces Jawa Barat dan media center
Hasil Analisis Tim DLA Bappenas, Februari 2007



INFRASTRUKTUR

Dampak bencana banjir terhadap sarana dan prasarana perkotaan selama dua minggu ini ternyata cukup signifikan, baik dari sisi kerusakan maupun kerugiannya., dengan perkiraan mencapai Rp. 1,22 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah maupun media masa, dampak kerusakan dan kerugian terhadap sarana dan prasarana perkotaan seperti yang diringkas pada tabel berikut.

Tabel II.4
Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur

| Sektor & Sub-sektor | Nilai (juta rupiah) | | | Kepemilikan (juta rupiah) | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | Kerusakan | Kerugian | Total | Publik | Swasta/masyarakat |
| Transportasi Darat | 271,149.88 | 330,240.00 | 601,389.88 | 281,389.88 | 320,000.00 |
| 1 Jalan dan Jembatan | 257,021.88 | | 257,021.88 | 257,021.88 | |
| 2 Kereta api | 14,128.00 | 9,240.00 | 23,368.00 | 23,368.00 | |
| 3 Jalan tol | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 4 Bus Way & Organda | | 320,000.00 | 320,000.00 | - | 320,000.00 |
| Transportasi Laut | - | | | | |
| Energi | 22,768.00 | 175,600.00 | 198,368.00 | 198,368.00 | |
| 1 Listrik | 22,768.00 | 75,600.00 | 98,368.00 | 98,368.00 | |
| 2 Depo Bahan Bakar Umum | NA | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| Pos dan Telekomunikasi | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| Air dan Sanitasi | 15,400.00 | 2,000.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | |
| Infrastruktur Pertanian | 18,652.22 | - | 18,652.22 | 18,652.22 | - |
| 1 Irigasi Teknis | 5,044.30 | | 5,044.30 | 5,044.30 | |
| 2 Irigasi Non-teknis | 80.00 | | 80.00 | 80.00 | |
| 3 Irigasi Sederhana | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | |
| 4 Tanggul & Tebing | 12,836.00 | | 12,836.00 | 12,836.00 | |
| 5 Pintu air | 671.92 | | 671.92 | 671.92 | |
| Total | 327,970.10 | 525,840.00 | 853,810.10 | 533,810.10 | 320,000.00 |

Sumber: Departemen PU, Pemprov Jabar, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, PDAM Kab. Bogor, PT PLN & Media, Februari 2007

PERHUBUNGAN DARAT

Penilaian dampak bencana banjir terhadap Sektor Transportasi Darat secara umum dikelompokkan pada; jalan dan jembatan, kereta api, jalan tol serta kehilangan pendapatan akibat tidak beroperasinya sejumlah angkutan umum, termasuk Trans Jakarta.

Pada Sub sektor jalan dan jembatan nilai kerusakan diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 272 miliar, akibat kerusakan cukup berat terjadi pada ruas-ruas jalan dan jembatan yang terendam banjir di ke tiga provinsi di wilayah Jabodetabek. Ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah tercatat di DKI Jakarta dengan total sekitar 19 km, di Kabupaten Tangerang sekitar 17,7 km, 98 ruas jalan di Kabupaten Bekasi, serta ruas-ruas jalan di Kota Depok. Jembatan yang rusak berat akibat bencana banjir tercatat di Kabupaten Tangerang 5 jembatan, di Kabupaten Bogor (4), di Kota Bogor (3), di Kota Depok (3) dan di Kabupaten Bekasi (2).

Kerugian akibat kerusakan jalan dan jembatan ini sebagian besar dialami oleh para pengguna jalan karena adanya peningkatan waktu tempuh, yang didalamnya termasuk peningkatan penggunaan BBM, keausan ban dan onderdil kendaraan serta *time value* dari para pengguna jalan. Untuk dampak kerugian yang tidak langsung belum dipertimbangkan dalam laporan ini.

Pada sub sektor Kereta Api, kerusakan terjadi karena 3 stasiun depo terendam air termasuk kerusakan rel di 6 lokasi serta kerusakan peralatan sinyal dengan total perkiraan kerusakan senilai Rp. 14,1 miliar. Kerugian yang di alami oleh PT KAI timbul karena hilangnya pendapatan dari penjualan karcis selama 6 hari akibat berkurangnya frekuensi perjalanan kereta api.

Pada sub sektor Jalan Tol, dampak bencana banjir yang dialami oleh pengelola jalan tol yaitu kerugian akibat ditutupnya operasi jalan tol untuk

beberapa hari karena terendam banjir dan adanya kebijakan dibukanya akses tol untuk semua pengguna kendaraan. Berkurangnya pendapatan yang dialami PT Jasa Marga selama 2 hari diperkirakan sebesar Rp. 1 miliar.

Pada sub sektor angkutan umum, kerugian karena dampak bencana banjir juga dialami langsung oleh para pengelola dan pemilik angkutan umum karena tidak beroperasinya angkutan umum pada jalur yang terendam banjir. Diperkirakan kerugian langsung yang dialami oleh pengelola angkutan umum, termasuk Trans Jakarta adalah senilai Rp 320 miliar.

ENERGI

Penilaian dampak bencana banjir terhadap Sektor Energi dikelompokkan pada kelistrikan dan bahan bakar umum.

Pada sub sektor energi, PT. PLN melaporkan kerusakan terjadi pada pompa air dan peralatan lainnya di 7 gardu induk, peralatan pada gardu distribusi dan kerusakan di jaringan distribusi yang tersebar di daerah-daerah genangan di wilayah Jabodetabek. Kerusakan yang diperkirakan senilai Rp 22,7 miliar ini mengakibatkan sekitar 672 ribu pelanggan tidak mendapat pasokan listrik setidaknya selama satu minggu yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian langsung yang dialami PT. PLN senilai Rp 75,6 miliar karena pemasukan dari rekening listrik sebesar 120.000 Mwh.

Estimasi kerugian yang berdampak di sektor swasta dan masyarakat karena tidak memperoleh pasokan listrik belum dapat dilakukan dalam laporan ini. Kerugian diantaranya akan mencakup *opportunity loss* dunia usaha yang tidak dapat mengoperasikan kegiatannya dan pengeluaran tambahan dari masyarakat karena harus membeli serta mengoperasikan genset sebagai substitusi dari listrik PLN.

Pada sub sektor bahan bakar, dampak langsung dialami oleh Depo Bahan Bakar Umum di Plumpang yang terendam banjir. Sampai posisi saat ini, pihak PT Pertamina hanya melaporkan adanya kerugian langsung sekitar Rp 1 miliar yang dialami Depo Plumpang karena tidak dapat beroperasi selama 4 hari. Di samping itu terdapat 11 unit SPBU yang terendam banjir di wilayah Jabodetabek, namun tidak dilaporkan nilai kerusakan maupun kerugian yang dialami.

POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pada Sektor Pos dan Telekomunikasi, dampak banjir juga dialami oleh PT. Telkom karena padamnya listrik dan terendahnya STO Semanggi II dengan kapasitas 76.000 SST, sehingga menyebabkan lumpuhnya puluhan ribu satuan sambungan telepon. PT Telkom memperkirakan kerugian langsung yang dialami karena terganggunya operasi sekitar satu minggu yaitu sebesar Rp 18 miliar.

AIR DAN SANITASI

Penilaian dampak bencana banjir terhadap Sektor Air dan Sanitasi hanya dilakukan pada sub sektor air minum sesuai data yang tersedia.

Dampak bencana banjir dialami oleh 3 (tiga) pengelola air minum di wilayah Jabodetabek, yaitu PT. Palyja dan PT. Thames PAM Jaya (PT. TPJ) yang mengelola dan mendistribusikan air minum untuk wilayah DKI Jakarta dan PDAM Kabupaten Bogor. Kerusakan pada sub sektor air minum yang dialami oleh pengelola penyedia air minum wilayah DKI Jakarta sebagian besar disebabkan terendahnya pompa dan genset di 6 Instalasi Pengolahan Air, yaitu IPA Pejompongan I, IPA Pejompongan II, IPA Pulo Gadung, IPA Buaran dan IPA Cilandak. Sehingga diperkirakan nilai kerusakan dari IPA tersebut mencapai Rp 15,4 miliar. Kerugian akibat terhentinya pasokan air minum kepada pelanggan, baik dari sisi pengelola maupun dari sisi pelanggan pada saat ini belum dapat dilaporkan.

Kerugian yang dialami PDAM Kabupaten Bogor karena lebih dari satu minggu tidak dapat memberikan pasokan air kepada pelanggan karena adanya kerusakan pada pipa distribusi dan jembatan pipa yang runtuh diterjang banjir. Perkiraan untuk memperbaiki kerusakan tersebut mencapai Rp 2 miliar dan kerugian dari terhentinya pasokan air kepada pelanggan diperkirakan juga mencapai Rp 2 miliar. Kerugian yang dialami oleh para pelanggan karena harus mencari pengganti sumber air bersih yang tidak di pasok dari PDAM Kabupaten Bogor belum dapat dihitung dalam laporan ini.

INFRASTRUKTUR PERTANIAN

Penilaian dampak bencana banjir terhadap Sektor Infrastruktur Pertanian hanya dilakukan pada sub sektor irigasi sesuai data yang tersedia.

Pada sub sektor irigasi teknis, kerusakan saluran irigasi teknis sepanjang 2 km di Kabupaten Tangerang dan sepanjang 8,5 km di Kabupaten Bogor, dan di Kota Depok dengan perkiraan nilai kerusakan sebesar Rp 5 miliar, sedangkan nilai kerugian yang ditanggung baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat karena rusaknya saluran irigasi ini belum dapat disampaikan pada posisi saat ini.

Adanya aliran air yang melebihi kapasitas mengakibatkan diperlukannya perbaikan pada tanggul-tanggul di sepanjang 13 (sungai) di wilayah Jabodetabek. Perkiraan nilai kerusakan ini mencapai Rp 12,8 miliar. Di samping itu, nilai kerusakan Pintu Air yang terjadi sebanyak 17 buah di Kali Bekasi dan 9 pintu air di Kabupaten Tangerang diperkirakan mencapai jumlah Rp 670 juta.



SEKTOR SOSIAL

Jabodetabek dengan total populasi 24,2 juta orang dan dengan luas total wilayah 7.315 km² merupakan wilayah yang memiliki kepadatan tinggi, terutama di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai lebih dari 13,6 ribu jiwa/km². Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, secara langsung maupun tidak langsung wilayah padat ini memiliki potensi permasalahan sosial yang juga tinggi saat dan setelah dilanda oleh bencana, seperti banjir yang melanda di awal tahun 2007 ini.

Beberapa dampak langsung dari bencana banjir yang melanda kawasan Jabodetabek termasuk permasalahan di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain kerusakan fisik bangunan dalam skala berat, sedang dan ringan, dampak langsung terhadap masyarakat sangat mempengaruhi aspek kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. Kehilangan sanak keluarga, tempat tinggal, harta benda dan luka fisik menimbulkan kerugian materiil dan juga berdampak pada kondisi kejiwaan masyarakat yang terkena langsung dampak bencana ini.

Sekitar 590.407 jiwa di wilayah Jabodetabek mengungsi pada saat ketinggian air mencapai angka tertinggi dikarenakan tempat tinggal mereka tergenang banjir yang di wilayah tertentu dapat mencapai atap rumah atau bahkan menenggelamkan rumah mereka. Walaupun pada hari-hari berikutnya sebagian dari para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing untuk

mulai membersihkan rumah mereka dari kotoran yang terbawa oleh banjir, dampak yang dirasakan oleh tiap-tiap keluarga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dapat dipulihkan kembali seperti semula.

Korban jiwa sampai dengan tanggal 13 Februari 2007 sudah mencapai angka 79 orang. Ratusan orang harus menjalani perawatan, baik rawat jalan maupun rawat inap sejalan dengan mulai berjangkitnya penyakit yang memang dikhawatirkan akan timbul sebagai dampak susulan dari bencana banjir, seperti ISPA, diare, pneumonia, penyakit kulit, dan leptosprosis. Dengan banyaknya jumlah orang yang perlu mendapatkan perawatan, berarti diperlukan juga upaya ekstra dari penyedia layanan kesehatan untuk membantu para korban banjir. Padahal, tidak sedikit fasilitas kesehatan yang juga mengalami kerusakan secara fisik baik fisik bangunan, peralatan medis maupun rusaknya persediaan obat-obatan yang diperlukan.

Sarana dan fasilitas pendidikan pun tidak luput dari terjangkit banjir tahun ini. Sekitar 276 sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMU terkena dampak banjir dan mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan ringan, sedang, sampai berat yang juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit serta membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat merehabilitasi dan mengembalikan kondisi sekolah-sekolah itu supaya dapat kembali berfungsi sebagai tempat belajar mengajar yang layak.

Walaupun laporan kerusakan dan kerugian tidak sebesar fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatanpun turut terkena dampak banjir. Sama seperti prasarana dan sarana pendidikan, selain secara langsung diterjang oleh banjir, banyak juga sarana peribadatan yang berubah fungsi menjadi tempat penampungan sementara bagi para pengungsi banjir. Sejumlah tempat pemakaman umum pun mengalami kerusakan akibat banjir yang menggenangi area pemakaman tersebut.

Kondisi lain yang juga akan terpengaruh oleh banjir ini adalah angka kemiskinan yang berpotensi mengalami perubahan. Meskipun data yang signifikan belum diperoleh pada status saat ini, diperkirakan akan terjadi kenaikan angka kemiskinan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin diperlukan upaya terpadu lintas sektor dan lintas wilayah untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka dengan menghindarkan mereka dari ancaman berbagai bencana di masa mendatang.

PENDIDIKAN

Total kerusakan dan kerugian yang menimpa dunia pendidikan di wilayah Jabodetabek diperkirakan hampir mencapai Rp 14 miliar meliputi kerusakan bangunan fisik, rusak atau hilangnya peralatan belajar mengajar, termasuk meubelair, dan kerusakan akibat digunakannya gedung-gedung sekolah sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi banjir untuk jangka waktu tertentu.

Tabel II.5
Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Sektor Pendidikan

| KOMPONEN | Total Jabodetabek | Kerusakan (Juta Rupiah) | Kerugian (juta rupiah) |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Jumlah TK yang rusak | 15 | 300.00 | 203 |
| Jumlah SD yang rusak | 224 | 8,118.45 | 4,032 |
| Jumlah SMP yang rusak | 22 | 496.28 | 396.00 |
| Jumlah SMA yang rusak | 15 | 448.84 | 270.00 |
| Total | 276 | 9,363.57 | 4,900.50 |

Sumber : Kabupaten/Kota terkait di Jabodetabek, Februari 2007.

Berbanding lurus dengan jumlah populasi yang bermukim di wilayah Jabodetabek, jumlah sekolah mulai dari taman bermain sampai dengan sekolah menengah tingkat atas yang bertempat di wilayah Jabodetabek mencapai 18,597 sekolah, terdiri dari 5.918 TK dan sederajat, SD (8.257), SMP (2.190) dan SMU (2,232). Angka kerusakan di sektor pendidikan berdasarkan data terakhir yang diterima Bappenas mencapai angka Rp. 9,4 miliar. Di Wilayah Jabodetabek tercatat 276 sekolah yang tergenang dengan rincian 15 TK, 224 SD, 22 SMP, dan 15 SMU. Kerusakan yang dialami sub sektor pendidikan mencakup kerusakan bangunan, peralatan belajar mengajar, dan buku-buku. Selain dampak langsung yang menimpa sekolah yang memang terendam banjir, sejumlah sekolah yang tidak terendam banjir pun turut mengalami dampak dari banjir ini, baik akibat terputusnya akses di sekitar sekolah maupun karena sekolah menjadi tempat pengungsian bagi para korban banjir.

Kerugian yang dialami oleh sektor pendidikan mencakup besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk merehabilitasi bangunan, mengganti peralatan dan buku, dan merelokasi sementara kegiatan belajar-mengajar pada sekolah yang mengalami kerusakan akibat banjir. Untuk memperkirakan kerugian, digunakan asumsi bahwa per unit sekolah rata-rata terdiri dari 9 ruang belajar serta biaya relokasi sementara, termasuk penggantian buku dan peralatan dengan biaya rata-rata sebesar Rp 1,5 juta/ruang belajar untuk TK serta Rp 2 juta/ruang belajar untuk SD, SLTP dan SMU, sehingga jumlah perkiraan potensi kerugian mencapai Rp 4,9 miliar.

KESEHATAN

Total kerusakan dan kerugian sektor kesehatan di wilayah Jabodetabek diperkirakan mencapai Rp 175 juta. Angka ini belum termasuk kerugian penyedia maupun pengguna layanan kesehatan. Data korban yang tercatat sampai dengan tanggal 10 Februari 2007 mencapai 77 orang untuk wilayah Jabodetabek. Pada tanggal 12 Februari jumlah pengungsi sudah berkurang menjadi 223.203 orang.

Fasilitas kesehatan di wilayah Jabodetabek terdiri dari 325 rumah sakit dan 720 puskesmas yang melayani penduduk di wilayah tersebut yang berjumlah 24,2 juta orang.

Tabel II.6
Data kerusakan prasarana kesehatan puskesmas

| KOMPONEN | DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan) | Banten (Kab. & Kota Tangerang) | Jawa Barat (Depok, Bekasi, Bogor) | Total Jabodetabek |
|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Pupulasi | 9,041,605 | 4,862,193 | 10,267,802 | 24,171,600 |
| Jumlah Pengungsi | 276,333 | 42,278 | 271,796 | 590,407 |
| Presentase Pengungsi | 3.06% | 0.87% | 2.65% | 2.44% |
| Jumlah Meninggal | 48 | 13 | 18 | 79 |
| puskesmas yang rusak ringan | 28 | NA | 1 | 29 |
| puskesmas pembantu yang rusak | NA | NA | NA | |
| pusat pelayanan terpadu yang rusak | 4 | NA | NA | 4 |

Sumber : Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas.

Data per tanggal 14 Februari 2007 menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan terdiri dari 28 unit Puskesmas di wilayah DKI Jakarta, 1 unit di wilayah Kota Depok, dan 4 unit puskesmas pembantu di Kabupaten Bekasi. Kerusakan fasilitas penyedia layanan kesehatan mencakup kerusakan bangunan, rusak atau hilangnya peralatan dan furniture, maupun obat-obatan akibat terendam atau bahkan tersapu banjir.

Kerugian lain yang berdampak pada kesehatan masyarakat adalah terhambatnya pasokan air bersih untuk minum dan mandi. Jumlah pasien yang mendapatkan layanan kesehatan sebagai dampak dari bencana banjir ini mencapai 93.912 pasien rawat jalan yang mengalami gangguan penyakit ISPA, diare, pneumonia, kulit, radang sendi, termasuk 3 (tiga) kasus leptosprosis telah ditemukan di antara korban/pengungsi banjir.

Bagi para penyedia layanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, kerugian lebih banyak disebabkan oleh perlu disediakannya biaya yang cukup besar untuk menyediakan dan mendistribusikan obat-obatan untuk para korban bencana. Selain pengobatan, diperlukan tindakan pencegahan penyebaran wabah penyakit yang mungkin terjadi di tempat-tempat pengungsian diakibatkan situasi darurat yang menurunkan tingkat sanitasi dari para korban banjir.

Penyediaan pasokan obat-obatan, termasuk bahan-bahan kimia penjernih air maupun pencegah berkembangbiaknya vector penyakit merupakan langkah-langkah yang memang harus dilaksanakan secara cepat. Program kampanye kesehatan masyarakat juga perlu dilakukan untuk memberikan informasi bagi masyarakat untuk menghadapi kondisi darurat. Untuk rumah sakit, klinik dan penyedia layanan kesehatan lainnya yang mengalami kerusakan akibat terendam banjir juga perlu menyediakan sumber daya ekstra untuk merevitalisasi fungsi pelayanan kesehatan.

KEAGAMAAN

Sampai dengan tanggal 13 Februari 2007, angka yang masuk baru mencatat 232 masjid dan 6 mushalla, 1 pesantren dan 227 madrasah di wilayah Jabodetabek yang mengalami kerusakan akibat banjir, dengan perkiraan nilai kerusakan sebesar Rp 34,3 miliar.



SEKTOR-SEKTOR PRODUKTIF

Prinsip Utama: Faktor yang perlu diperhatikan dalam sektor-sektor produktif adalah ukuran relatif kerusakan dan perkiraan kerugian di masa depan, jika kerusakan tidak diperbaiki dalam kurun waktu yang masuk akal. **Di sinilah letak** pesan pentingnya: rehabilitasi dan rekonstruksi segera prasarana yang rusak akan memulihkan air untuk pertanian dan menghindarkan banjir di kemudian hari; dan pemberian likuiditas kepada UKM yang terkena gempa akan mengurangi (aliran) tidak langsung kerugian karena bencana, dengan membantu melanjutkan kegiatan perekonomian dengan segera.

Bencana banjir menimbulkan kerugian yang cukup besar pada sektor ekonomi produktif. Selain sektor formal yang mencakup kawasan Industri, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan dan pariwisata, bencana banjir juga terutama merugikan sektor produktif informal. Sebagaimana diketahui, dampak terbesar bencana banjir dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai dimana kegiatan ekonomi informal (UKM tidak berbadan hukum) banyak berlangsung. Kerusakan dan kerugian di sektor pertanian dan perternakan diperkirakan tidak terlalu signifikan mengingat sektor tersebut tidak terlalu besar untuk wilayah JABODETABEK, terutama yang terimbas bencana banjir yang lalu. Ringkasan nilai kerusakan dan kerugian pada sektor sektor ekonomi produktif dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel II.7
Penilaian Kerusakan dan Kerugian pada Sektor Ekonomi Produktif

| Sektor | Kerusakan (Juta Rp) | Kerugian (Juta Rp) | Total (Juta Rp) |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Usaha | | | |
| Industri Besar | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Usaha Kecil dan Menengah | 13,650.00 | 729,000.00 | 742,650.00 |
| Usaha Mikro Informal | 530.25 | 46,000.00 | 46,530.25 |
| Perdagangan | | | |
| Pasar | 1,020.11 | 61,247.51 | 62,267.62 |
| Pariwisata | | | |
| Pertanian, Peternakan dan Perikanan | | | |
| Pertanian | 3,094.85 | 11,012.50 | 14,107.35 |
| Peternakan | | 13,893.31 | 13,893.31 |
| Perikanan | 9,822.50 | 6,210.13 | 16,032.63 |
| Total Sektor Ekonomi Produktif | 28,117.71 | 2,867,363.45 | 2,895,481.16 |

Sumber : Hasil analisa

USAHA/INDUSTRI BESAR, MENENGAH DAN KECIL

Hingga akhir 2006 diperkirakan jumlah usaha yang berkembang di propinsi DKI saja mencapai sekitar 1,842 untuk industri besar. Sedangkan usaha kecil dan menengah tercatat sekitar 154.166 unit usaha. Data melaporkan hingga saat ini menyebutkan bahwa jumlah total kerusakan dan kerugian di sektor usaha industri besar mencapai angka mendekati Rp 2,6 triliun. Sebagian besar dari angka tersebut berasal dari kerugian yang harus ditanggung karena terhentinya proses produksi selama kurang lebih 7 hari saat banjir berlangsung. Mengingat sifat bencana yang terlokalisir, maka kerugian di sektor industri besar dihitung kecil karena sebagian besar usaha bisa kembali berproduksi setelah air surut. Berbeda dengan bencana gempa bumi di Jogja atau tsunami di Aceh yang menimbulkan kerugian cukup besar karena proses produksi harus berhenti untuk jangka waktu yang lama hingga asset asset yang rusak tergantikan.

PERDAGANGAN

Data dari Departemen Perdagangan menunjukkan bahwa 53 pasar di kawasan JABODETABEK sempat terendam selama musibah banjir kemarin. Nilai kerusakan dan kerugian yang timbul diestimasikan sekitar Rp 62,3 milyar. Angka kerusakan dinilai dari jumlah los pasar yang rusak sementara kerugian pasar dihitung dari berkurangnya pemasukan selama terhentinya aktivitas pasar pada saat banjir.

Sementara untuk sarana perdagangan modern seperti supermarket dan Mall diperkirakan nilai kerusakan yang diderita tidak terlalu signifikan sehingga diabaikan dalam laporan ini. Kerugian yang timbul sebagian besar

dikarenakan tertutupnya akses selama kurang lebih 7 hari saat banjir berlangsung hingga air surut.

PARIWISATA

Data dari dinas pariwisata tidak melihat adanya kerusakan disektor tersebut yang perlu dilaporkan. Demikian juga untuk kerugian yang diderita sektor ini, hingga saat ini belum ada laporan penundaan kunjungan wisata dari wisatawan mancanegara. Taksiran perkiraan kerugian didapatkan dari penurunan jumlah kunjungan ke objek-objek wisata unggulan di DKI karena terbatasnya akses selama banjir. Dari angka yang didapatkan, kerugian selama berkurangnya pengunjung dalam 7 hari bisa dikatakan tidak signifikan. Di sisi lain, tingkat hunian hotel dan penginapan yang berkurang karena turunnya kunjungan wisatawan domestik, justru dikompensasikan dengan meningkatnya tamu dari lokal jakarta sendiri. Sebagian keluarga yang rumahnya terkena banjir memilih hotel sebagai tempat penampungan sementara selama genangan air masih tinggi dan layanan fasilitas air dan listrik belum kembali seperti semula.

PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Luasan lahan yang tergenang selama bencana banjir mencapai sekitar 32.750 ha area pertanian. Kerusakan di sektor ini diperkirakan cukup kecil mengingat sifat bencana yang tidak merusak lahan sehingga nilai kerusakan lahan per hektare tidak signifikan. Demikian juga halnya dengan nilai kerugian. Sebagian besar lahan yang terendam adalah lahan produksi yang baru saja ditanami sehingga nilai kerugian yang diderita hanyalah sebesar nilai benih yang harus diganti serta kerugian tambahan yg diderita karena kemunduran jadwal panen. Ditinjau dari presentase total sektor ekonomi produktif, sub-sektor pertanian tidak terlalu signifikan karena luas area pertanian sendiri di kawasan Jabodetabek tidak besar.

Hal yang sama terjadi pada sektor peternakan. Secara umum bencana banjir tidak menimbulkan kerugian yang berarti di sektor peternakan. Ini dapat dilihat dari jumlah kerugian yang dilaporkan sektor ini. Sebagaimana sektor pertanian, rendahnya angka kerugian ini juga dikarenakan rendahnya luas total area peternakan di wilayah Jabodetabek.

Dari sektor perikanan dilaporkan total kerusakan dan kerugian yang diderita hingga saat ini mencapai Rp 16 miliar untuk Kabupaten Tangerang dan Bekasi. Nilai kerusakan yang tercatat ini sebagian besar berasal dari produksi ikan darat. Tangerang dan Bekasi sendiri diprediksikan setiap bulannya memproduksi sekitar Rp 10 miliar .

LANGKAH SELANJUTNYA

Dengan banyaknya kerugian manusia, sosial, dan fisik, sektor-sektor produktif di beberapa sentra ekonomi yang paling hidup di Indonesia telah terkena dampak bencana banjir. Karena banyaknya industri rumahan, ratusan ribu rumah tangga kehilangan tempat tinggal mereka dan sumber penghasilan mereka. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi seharusnya bisa membantu penduduk yang terkena dampak untuk segera membangun kembali kehidupan mereka.

Prinsip-Prinsip Kunci untuk Memulihkan Mata Pencaharian yang Hilang melalui Kebangkitan Sektor Produktif

- Menanam modal untuk memperbaiki kerusakan fisik – hal ini tidak hanya akan segera menghasilkan uang tunai bagi orang-orang yang terkena dampak untuk bertahan hidup, tetapi juga mengurangi secara signifikan kerugian penghasilan yang diantisipasi di masa depan. Dengan sekitar setengah dari total dampak dalam bentuk kerugian yang diantisipasi di masa depan, biaya kesempatan karena tidak cepat tanggap sangat tinggi.
- Kerahkan dukungan finansial dalam dosis kecil untuk memulihkan kegiatan ekonomi – yang bertentangan dengan pandangan umum, sejumlah orang yang terkena bencana ingin sekali mendapat kredit dari bank dan lembaga lain. Pada waktu yang sama, kebijakan publik memegang peran yang penting untuk melakukan apa pun yang pemerintah mau tawarkan untuk mendukung .
- Belajarlah kerawanan bencana dan persiapkan rencana jika ada bencana berikutnya. Khususnya, lihatlah apa yang bisa pasar tawarkan untuk melindungi perusahaan dari bencana yang tidak terduga di masa depan.



LINTAS SEKTOR

Analisis lintas sektor meliputi subsektor pemerintahan/administrasi publik, lingkungan hidup, dan perbankan serta keuangan. Perkiraan kerusakan dan kerugian sudah mencakup bangunan dan peralatan pemerintah, maupun bangunan serta peralatan lembaga perbankan dan keuangan. Di sektor lingkungan, kerugian terjadi pada: a) manajemen limbah; b) rekonstruksi; c) prasarana lingkungan, dan d) efeknya pada ekosistem dan pelayananan lingkungan.

Bila digabungkan, kerusakan dan kerugian ketiga sektor ini relatif rendah dari seluruh kerusakan serta kerugian akibat bencana banjir. Tidak ada satu pun dari sektor-sektor ini yang secara signifikan terkena dampak banjir. Sebagian besar pelayanan pemerintah dan perbankan pulih dengan cepat. Ekosistem alami atau manajemen lingkungan pemerintah daerah tidak terkena dampak yang parah.

Walaupun tidak ada efek yang luas terhadap struktur fisik, kerugian di kemudian hari bisa signifikan jika tidak ada tindakan yang segera diambil, khususnya di sektor perbankan dan keuangan. Sementara kerusakan saat ini pada sektor tersebut relatif ringan, potensi kerugian di masa depan bisa sampai setinggi Rp 5,7 triliun.

Untuk meminimumkan kerugian di masa depan, pemulihan sektor keuangan harus didukung dan pinjaman harus sesegera mungkin bisa dikembalikan. Kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan penyelesaian realistis terhadap masalah-masalah ini melalui restrukturisasi pinjaman yang belum dibayar, skema jaminan kredit yang memungkinkan UKM peminjam yang potensial untuk mengakses pinjaman tanpa jaminan, dan skema peminjaman yang potensial dan tepat sasaran. Semua tindakan ini dapat memungkinkan pemulihan perekonomian yang lebih cepat di kawasan ini.

Tindakan-tindakan kunci yang sekarang diambil dapat mengurangi kemungkinan kerugian di masa depan pada sektor lingkungan hidup. Khususnya, penilaian yang cermat perlu dilakukan terhadap rencana pembuangan puing, terhadap manajemen limbah berbahaya, dan perlu mengembangkan rencana kerja maupun merancang dan menetapkan standar bangunan dan untuk menyesuaikan kembali bangunan yang rusak.

PEMERINTAHAN

Dampak banjir terjadi pada KUA 10 unit di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan 4 unit di Provinsi Banten, seperti dilaporkan oleh Direktorat Agama dan Pendidikan Bappenas, dengan nilai kerusakan Kerusakan pada sub sektor pemerintahan sebesar Rp 320 juta.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Departemen Pertahanan melaporkan kerusakan pada asrama, rumah dinas, kantor dan peralatan ALUTSISTA POLRI , dengan nilai kerusakan sebesar Rp 66,53 miliar.

KEUANGAN DAN PERBANKAN

Bank Indonesia melaporkan kerugian pada sistem Anjung Tunai Mandiri sebesar Rp 20,60 miliar karena gangguan listrik pada saat banjir, dan sejumlah ATM tergenang air banjir.

LINGKUNGAN HIDUP

Isyu kerusakan lingkungan hidup pasca banjir meliputi: a) kontaminasi dan disrupsi air permukaan dan tanah yang bersih, b) erosi, abrasi dan pendangkalan muara sungai yang kemudian mengakibatkan c) kerusakan infrastruktur lingkungan seperti pintu air, kanal, drainase, pompa dan tanggul, d) kerusakan ekosistem hulu sungai yang membawa efek negatif pada kegiatan sektor perikanan dan e) kontaminasi air tanah akibat sampah yang belum diolah, termasuk pembersihan puing maupun barang yang dihanyutkan air banjir. Untuk memperkirakan kerusakan dan kerugian sektor lingkungan hidup diperlukan penelitian lebih lanjut, termasuk kerugian atas menurunnya fungsi ekologis pada daerah aliran sungai yang meliputi

kehilangan peluang sedimentasi pada daerah tangkapan dan kualitas serta retensi air di wilayah Jabodetabek.



Foto II.3: Sampah sisa bangunan yang hanyut akibat banjir, Bukit Duri, Jakarta

MASALAH UTAMA

Masalah-masalah utama yang terkait dengan **manajemen puing dan sampah** antara lain adalah:

- a) diteruskannya pelayanan pengangkutan sampah;
- b) dampak potensial terhadap sanitasi karena bertambahnya permintaan akan pembuangan sampah setelah mendapatkan bantuan;
- c) keamanan penduduk dan pekerja-pekerja yang terlibat dalam pekerjaan pembongkaran;
- d) dampak potensial terhadap lingkungan karena pembuangan puing di tempat pembuangan sampah darurat yang tidak layak; dan
- e) risiko-risiko yang bisa terjadi karena limbah yang berbahaya (mis.: dari semakin banyaknya volume limbah medis dari fasilitas-fasilitas perawatan yang sudah ada maupun yang baru dan dari industri-industri yang memiliki sarana pengolahan limbah yang rusak).

Untuk **rekonstruksi**, pokok-pokok yang tercakup ialah:

- a) memaksimalkan pemulihan sumber-sumber daya untuk membangun kembali guna menurunkan biaya dan menurunkan dampak terhadap lingkungan;
- b) memastikan bahwa standar bangunan yang tahan bencana dikembangkan dan ditegakkan sebagai bagian dari upaya rekonstruksi; dan
- c) menerapkan prinsip-prinsip perancangan yang positif bagi lingkungan hidup selama rekonstruksi (mis. untuk perencanaan ruang, konstruksi bangunan, penyediaan energi, air, dan sanitasi).

REKOMENDASI AWAL

Rekomendasi awal untuk dimensi lingkungan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup:

- a) Penilaian yang lebih saksama terhadap daerah-daerah yang terkena dampak terbesar. Untuk puing, ini mencakup: memperbaiki perkiraan puing gempa yang harus dibuang, evaluasi lingkungan terhadap puing di tempat-tempat pembuangan yang dipilih di setiap kecamatan, perlu dipercepatnya perencanaan fasilitas baru dan penilaian opsi untuk daur ulang/pemrosesan lebih lanjut dan menerapkan program-program untuk meminimumkan sampah yang harus dibuang.
- b) Melakukan penilaian terhadap manajemen limbah berbahaya dan mengembangkan rencana kerja untuk manajemen limbah secara lebih umum.
- c) Mengembangkan dan menerapkan pedoman-pedoman pembangunan kembali yang “hijau” untuk memajukan rekonstruksi yang mengurangi dampak lingkungan dan meminimumkan penggunaan sumber daya alami yang langka.
- d) Menilai dampak banjir terhadap pelayanan lingkungan hidup, khususnya sistem air tanah.
- e) Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana dan sistem kesiapan menghadapi bencana bagi kawasan yang berisiko.



BAGIAN III

DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL

Bagian ini membicarakan dampak gempa bumi yang luas terhadap mata pencaharian masyarakat di wilayah Jabodetabek. Bab ini menganalisis dampak bencana banjir terhadap perekonomian daerah, keuangan pemerintah daerah dan lapangan kerja, demikian juga akibatnya bagi kehidupan masyarakat yang langsung terkena dampak bencana banjir.

PENILAIAN AWAL POTENSI DAMPAK BANJIR

Berdasarkan penilaian awal kerugian dan kerusakan, bencana banjir di wilayah Jabodetabek mengakibatkan kerugian sebesar Rp 5,16 triliun dan kerugian ekonomi sebesar Rp 3,60 triliun. Dari perkiraan kerusakan dan kerugian dengan jumlah total Rp5,18 tersebut, sebesar Rp 649,5 miliar (atau 12,5%) adalah kerusakan dan kerugian beban pemerintah, sementara sebesar Rp 4,535 triliun adalah beban sektor swasta dan masyarakat; yang berarti 87,5 % dari total kerusakan dan kerugian merupakan milik masyarakat.

Kontribusi masing-masing sektor terhadap total kerusakan dan kerugian adalah sebagai berikut :

1. **sektor perumahan** : nilai kerusakan di sektor ini menyumbang terbesar (73,56%); dimana secara keseluruhan merupakan milik masyarakat;
2. **sektor infrastruktur publik** : nilai kerusakan di sektor ini mencapai 18,57% dan kerugian 15,38%; dimana sebagian besar (82,20%) merupakan milik pemerintah;
3. **sektor sosial** : nilai kerusakan mencapai 2,49% dan kerugian 0,14%; yang secara keseluruhan merupakan milik pemerintah;
4. **sektor ekonomi produktif** : nilai kerusakan pada sektor ini relatif kecil, namun nilai kerugiannya sangat signifikan hingga mencapai 83,87% dari total nilai kerugian; dimana secara keseluruhan merupakan tanggungan swasta/masyarakat;
5. **lintas sektor** : nilai kerusakan dan kerugiannya relatif sangat rendah, masing-masing menyumbang 3,79% dan 0,60% terhadap total kerusakan dan kerugian, dengan porsi yang lebih besar dimiliki oleh pemerintah.

Ditinjau dari kepemilikan sarana dan prasarana yang rusak, dari jumlah total kerusakan dan kerugian, urutan sektor yang menjadi beban pemerintah terbesar adalah: 1) sektor infrastruktur, sebesar 82,2%; 2) sektor lintas-sektor sebesar 10,29%; dan 3) sektor sosial sebesar 7,51%.

Penjelasan yang lebih rinci mengenai kerusakan dan kerugian per sub-sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1
Ringkasan Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Banjir Jabodetabek, Februari 2007

| SEKTOR & SUB SEKTOR | NILAI (MILYAR RUPIAH) | | | | | | KEPEMILIKAN | | | |
|--|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| | KERUSAKAN | % | KERUGIAN | % | TOTAL | % | PEMERINTAH | % | SWASTA/MASY | % |
| I PERUMAHAN | 1,298.92 | 73.56 | 0.00 | 0.00 | 1,298.92 | 25.05 | | 0.00 | 1,298.92 | 28.64 |
| II INFRASTRUKTUR | 327.97 | 18.57 | 525.84 | 15.38 | 853.81 | 16.47 | 533.81 | 82.20 | 320.00 | 7.06 |
| A TRANSPORTASI DARAT | | | | | | | | | | |
| 1. JALAN DAN JEMBATAN | 257.02 | | | | 257.02 | | 257.02 | | | |
| 2. KERETA API | 14.13 | | 9.24 | | 23.37 | | 23.37 | | | |
| 3. JALAN TOL | | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 4. TRANS JAKARTA & ORGANDA | | | 320.00 | | 320.00 | | | | 320.00 | |
| B ENERGI | 22.77 | | 175.60 | | 198.37 | | 198.37 | | | |
| C POS DAN TELEKOMUNIKASI | | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | | |
| D AIR DAN SANITASI | 15.40 | | 2.00 | | 17.40 | | 17.40 | | | |
| E INFRASTRUKTUR PERTANIAN | 18.65 | | | | 18.65 | | 18.65 | | | |
| III SOSIAL | 44.03 | 2.49 | 4.90 | 0.14 | 48.76 | 0.94 | 48.76 | 7.51 | 0.00 | 0.00 |
| 1. PENDIDIKAN | 9.36 | | 4.90 | | 14.26 | | 14.26 | | | |
| 2. KESEHATAN | 0.175 | | | | 0.175 | | 0.18 | | | |
| 3. PERIBADATAN | 34.33 | | | | 34.33 | | 34.33 | | | |
| 4. LEMBAGA SOSIAL | 0.17 | | | | | | | | | |
| IV EKONOMI | 28.12 | 1.59 | 2,867.36 | 83.87 | 2,895.48 | 55.85 | 0.00 | 0.00 | 2,895.48 | 63.85 |
| 1. USAHA/INDUSTRI B/KM/MIKR | 14.18 | | 2,775.00 | | 2,789.18 | | | | 2,789.18 | |
| 2. PERDAGANGAN | 1.02 | | 61.25 | | 62.27 | | | | 62.27 | |
| 3. PARIWISATA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 4. PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | 12.92 | | 31.12 | | 44.03 | | | | 44.03 | |
| VI LINTAS SEKTOR | 66.85 | 3.79 | 20.60 | 0.60 | 87.45 | 1.69 | 66.85 | 10.29 | 20.60 | 0.45 |
| 1. PEMERINTAHAN | 0.32 | | | | 0.32 | | 0.32 | | | |
| 2. LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 3. KEAMANAN & KETERTIBAN | 66.53 | | | | 66.53 | | 66.53 | | | |
| 4. KEUANGAN DAN PERBANKAN | | | 20.60 | | 20.60 | | | | 20.60 | |
| TOTAL | 1,765.89 | 34.06 | 3,418.70 | 65.94 | 5,184.43 | 100.00 | 649.43 | 12.53 | 4,535.00 | 87.47 |

Keterangan:

*) Kerusakan dalam Sektor Ekonomi, sub-sektor Perdagangan hanya mencakup pasar tradisional, tidak mencakup pasar modern/supermarket/mall

DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN REGIONAL DAN NASIONAL

Karena sektor unggulan masing-masing daerah berbeda, maka dampak bencana banjir terhadap masing-masing daerah di wilayah Jabodetabek berbeda pula. Perekonomian Provinsi DKI Jakarta didukung oleh sektor keuangan, jasa dan industri pengolahan sebesar 69,61% dari PDRB. Wilayah Depok, Bogor dan Bekasi di Provinsi Jawa Barat didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa sebesar 81,28% dari PDRB dan wilayah Tangerang di Provinsi Banten didukung oleh sektor industri pengolahan dan jasa sebesar 68,12% dari PDRB.

Tabel III.2
Produk Domestik Regional Bruto JABODETABEK
(harga konstan tahun 2000, dalam milyar rupiah)

| Propinsi Lapangan Usaha | DKI Jakarta | | Bogor-Depok -Bekasi | | Tangerang | |
|--|------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 2005 * | % | 2005 * | % | 2005 * | % |
| Pertanian | 290.39 | 0.10 | 2,738 | 3.82 | 2,937 | 9.07 |
| Pertambangan/Penggalian | 916.98 | 0.31 | 229 | 0.32 | 29 | 0.09 |
| Industri Pengolahan | 51,177.80 | 17.33 | 47,326 | 66.08 | 17,062 | 52.71 |
| Listrik, Gas dan Air Bersih | 1,977.20 | 0.67 | 1,251 | 1.75 | 1,717 | 5.30 |
| Bangunan | 29,094.58 | 9.85 | 2,051 | 2.86 | 747 | 2.31 |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | 63,492.89 | 21.50 | 10,888 | 15.20 | 5,008 | 15.47 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 23,286.74 | 7.89 | 2,450 | 3.42 | 2,547 | 7.87 |
| Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 90,874.27 | 30.78 | 1,782 | 2.49 | 908 | 2.81 |
| Jasa-jasa | 34,160.47 | 11.57 | 2,909 | 4.06 | 1,418 | 4.38 |
| PDRB | 295,271.32 | 100.00 | 71,622 | 100.00 | 32,373 | 100.00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Catatan : * Angka sangat sementara dari BPS

Dampak dari bencana banjir di wilayah JABODETABEK diperkirakan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,20% dari rencana pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan oleh pemerintah sebesar 6,3%. Mengingat pertumbuhan ekonomi wilayah *Bogor-Depok-Bekasi* dan *Tangerang* didukung oleh sektor industri pengolahan yang dominan dibandingkan sektor lainnya, maka dampak bencana banjir secara signifikan berpotensi menurunkan pertumbuhan PDRB daerah *Bogor-Depok-Bekasi* sebesar 1.33% dan *Tangerang* sebesar 2.62%. Perekonomian Provinsi DKI Jakarta diperkirakan tidak mengalami penurunan yang signifikan karena karena kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta adalah sektor keuangan dan jasa, namun

demikian dampak banjir berpotensi menurunkan pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta 0.59% pada sektor industri dan perdagangan.

Tabel III.3
Estimasi Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan
Besar Kerugian untuk Wilayah JABODETABEK
(harga konstan tahun 2000, dalam milyar rupiah)

| Propinsi / Nasional | 2006 | 2007 | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | PDRB / PDB ** | PDRB / PDB ** | Rasio PDRB terhadap PDB Nasional (%) | Rasio Kerugian per Propinsi **** | Besar Kerugian per Propinsi ***** | Penurunan Pertumbuhan PDRB / PDB (%) |
| DKI Jakarta | 311,510 | 331,135 | 16.88 | 49.00 | 1,827.19 | 0.59 |
| Bo-De-Bek (Kab/Kot) | 75,561 | 80,322 | 4.09 | 27.00 | 1,006.82 | 1.33 |
| Tangerang (Kab/Kot) | 34,153 | 36,305 | 1.85 | 24.00 | 894.95 | 2.62 |
| Total | 421,225 | 447,762 | 0.23 | 100.00 | 3,728.96 | 0.89 |
| Indonesia | 1,845,772 | 1,962,056 | 100.00 | | | 0.20 |

Catatan :

- ** Angka hasil analisa
- **** Rasio luas daerah Jabodetabek yang terendam digunakan sebagai acuan untuk menentukan besarnya rasio kerugian yang diderita oleh masing-masing propinsi.
- ***** Angka kerugian dideflasikan agar dapat dibandingkan dengan PDRB harga konstant tahun 2000.

Bencana banjir juga telah menghambat distribusi barang konsumsi dan bahan baku industri pengolahan, termasuk perdagangan luar negeri. Terputusnya akses dan terhambatnya distribusi barang dari dan ke Jakarta mengakibatkan langkanya barang-barang kebutuhan pokok yang berlanjut kepada kenaikan harga di wilayah Jabodetabek pasca banjir.

Selain itu, berdasarkan ramalan Badan Meteorologi dan Geofisika tentang curah hujan yang diperkirakan masih relatif tinggi hingga bulan Maret tahun ini berpotensi mengakibatkan gagalnya panen raya tahun ini yang selanjutnya akan memberikan tekanan pada inflasi di tahun 2007. Sektor lainnya seperti bangunan (properti) akan mengalami gangguan akibat terkoreksinya harga bahan bangunan karena terhambatnya distribusi bila terjadi genangan banjir. Apabila situasi genangan banjir berlangsung selama 1 (bulan) dan mengakibatkan terhambatnya akses ke pelabuhan maka diperkirakan neraca perdagangan akan terganggu.

Jika bencana banjir di wilayah Jabodetabek tidak berkepanjangan, maka diperkirakan tidak akan ada dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, mengingat nilai kerugian sebesar Rp. 8,7 trilyun yang diderita wilayah Jabodetabek pasca bencana banjir hanya memberikan kontribusi sebesar 0.46% terhadap PDRB Nasional. Selain itu, cepatnya masa pemulihan juga akan memperkecil dampak kerugian terhadap perekonomian nasional.



BAGIAN IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Bencana banjir yang melanda Jakarta dan daerah penyangga disekitarnya telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian aset yang diderita masyarakat dan pemerintah. Genangan air pada sekitar 60% wilayah Jakarta telah melumpuhkan fungsi prasarana utama dan kegiatan distribusi bahan pokok dan bahan bakar, serta mengganggu roda ekonomi. Sejumlah kegiatan ekonomi produktif diperkirakan mengalami hambatan produktivitas dengan estimasi kerugian setiap minggu sebesar Rp 7,314 miliar. Selain dampak ekonomi dan ancaman inflasi yang perlu dikendalikan, dampak sosial bencana banjir sangat signifikan terhadap potensi kehilangan mata pencaharian dan potensi penyakit pasca banjir. Terhambatnya suplai air bersih, makanan, pakaian kering, kurangnya fasilitas sanitasi dan pelayanan medis pada saat banjir mengakibatkan kondisi korban banjir serta lingkungan di sekitarnya rentan terhadap menyebarnya wabah penyakit. Hingga tanggal 14 Februari 2007 tercatat 79 orang korban jiwa dan 223.203 orang pengungsi yang belum dapat kembali kerumah masing-masing, dengan perkiraan kerusakan dan kerugian mencapai Rp 5,16 triliun dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp3,60 triliun.

Pelajaran dari bencana banjir yang telah terjadi di Jakarta pada tahun 1996, 2002 dan 2007 ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa beberapa kali banjir besar melanda kota lama Batavia antara lain pada tahun 1621, 1654, dan 1918 karena kondisi geomorfologi Jakarta yang sama rata dengan permukaan air laut. Banjir di Jakarta adalah fenomena alam bagi permukiman yang dilalui 13 (tiga belas) aliran sungai yang perlu dikendalikan dengan prasarana pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Selain itu, pendekatan *environmental governance* oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam manajemen perkotaan sangat diperlukan untuk mengurangi resiko bencana akibat perilaku manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam.

Selain berhadapan dengan ancaman banjir, wilayah DKI Jakarta juga menghadapi penurunan muka air tanah yang akan mengancam ketersediaan air baku untuk suplai air bersih. Dari struktur geologi, wilayah Jakarta dan sekitarnya juga berhadapan dengan ancaman geologi karena terletak pada daerah sesar DAS Ciliwung.

Isu perencanaan dan penanggulangan yang perlu ditindak-lanjuti berdasarkan hasil penilaian potensi kerugian dan kerusakan serta potensi dampak banjir di wilayah DKI Jakarta pada awal bulan Februari 2007 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2010 perlu diintegrasikan dengan perencanaan tata ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur yang menggunakan pendekatan pengurangan risiko bencana banjir, kekurangan sumber air bersih dan geologi.

2. Rencana Induk Pengendalian Banjir JABODETABEK perlu direvisi
3. Untuk pengurangan risiko bencana perlu segera dirumuskan pedoman operasional dan pedoman koordinasi yang dapat digunakan SATKORLAK, SATLAK, instansi pemerintah terkait, swasta dan masyarakat untuk :
 - a) Upaya pencegahan sebelum bencana
 - b) Sistem peringatan dini dan pengendalian kerusakan
 - c) Upaya penanggulangan sesudah terjadi banjir dan bencana geologi
 - d) Tindakan dalam fase tanggap-darurat
4. Penyusunan rencana aksi pemulihan pasca bencana
5. Pelaksanaan program pemeliharaan saluran drainase alam dan buatan di wilayah perkotaan dan sekitarnya
6. Mobilisasi pendanaan pemerintah dan non pemerintah bagi pemulihan pasca bencana
7. Rencana pemanfaatan sumber daya air terpadu termasuk penyelamatan sumber air baku bagi penyediaan air bersih di Jakarta dan sekitarnya
8. Rencana tindak pengelolaan DAS Ciliwung dan DAS Cisadane
9. Strategi dan mekanisme penyertaan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian banjir dan pemanfaatan sumber daya air
10. Regulasi dan mekanisme pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya air yang harmonis di wilayah JABODETABEK dan PUNJUR
11. Manajemen kelembagaan dan pendanaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya air di wilayah JABODETABEK dan PUNJUR

REKOMENDASI

RENCANA TINDAK JANGKA PENDEK

Dalam rangka mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat dan memberikan dukungan terhadap pemulihan pasca bencana, maka diperlukan :

1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2010
2. Pedoman operasional tentang mitigasi bencana yang memuat konteks :
 - a. *Upaya pencegahan sebelum terjadi banjir dan bencana geologi*
 - Pemeliharaan prasarana pengendalian banjir, sebagai program bersama pemerintah, swasta dan masyarakat

- Koordinasi antar instansi terkait lintas-wilayah disertai dengan pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing
 - Penyediaan peta daerah rawan banjir, jalur evakuasi, lokasi tempat penampungan sementara, posko banjir dan pos pengawasan ketinggian air
 - Penyediaan sistem peringatan dini beserta pemeliharannya
 - Perencanaan penyediaan logistik untuk tanggap darurat (makanan, air minum, bantuan dan perlengkapan medis, kebutuhan lainnya, perlengkapan penyelamatan, peralatan berat untuk pembersihan, dan sebagainya)
 - SOP untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat
 - Penyelenggaraan sistem informasi banjir untuk disampaikan kepada masyarakat dengan cepat
 - Program untuk meningkatkan kesiapan masyarakat
 - Pembentukan dan pemeliharaan jejaring antara pemerintah, LSM dan organisasi sosial masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan banjir dan bencana lainnya
- b. Sistem peringatan dini dan pengendalian kerusakan*
- Penyiapan sistem peringatan dini yang dapat menyampaikan pesan secara cepat kepada masyarakat di daerah rawan banjir
 - Mekanisme mobilisasi bantuan untuk masyarakat korban banjir
- c. Upaya penanggulangan sesudah terjadi bencana*
- Metodologi dan mekanisme pengumpulan data, verifikasi dan penilaian dampak banjir
 - Penilaian kerusakan dan kerugian
 - Pengembalian pengungsi kerumah masing-masing
 - Mekanisme koordinasi pelaksanaan pembersihan prasarana vital dari sampah, puing dan lumpur
 - Pemulihan fungsi prasarana vital dalam masa tanggap darurat
 - Pedoman penyusunan rencana aksi pemulihan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi
- d. Tindakan dalam fase tanggap-darurat pasca bencana*
- Tatacara pengawasan potensi meningkatnya intensitas bencana
 - Penyiapan tempat penampungan pengungsi dan penyediaan logistik
 - Pelaksanaan operasi SAR
 - Penyiapan patroli untuk memantau keadaan aset yang ditinggalkan oleh pengungsi

- Pemantauan aset strategis seperti bandar udara, akses distribusi utama, jalan tol, daerah perkantoran, daerah perdagangan, daerah industri dan rumah sakit
 - Tatalaksana penyusunan laporan harian
3. Penyusunan rencana aksi pemulihan pasca bencana banjir
 4. Pelaksanaan program pemeliharaan saluran drainase alam dan buatan di wilayah perkotaan
 5. Mobilisasi pendanaan pemerintah dan non pemerintah bagi pemulihan pasca bencana banjir

RENCANA TINDAK JANGKA MENENGAH

Dalam rangka mendukung program pembangunan yang berkelanjutan di wilayah JABODETABEK dan PUNJUR, maka diperlukan :

1. Revisi Rencana Induk Pengendalian Banjir di wilayah JABODETABEK
2. Rencana pemanfaatan sumber daya air terpadu termasuk penyelamatan sumber air baku bagi penyediaan air bersih di JABODETABEK
3. Rencana Tindak Pengelolaan DAS Ciliwung dan DAS Cisadane
4. Strategi dan mekanisme penyertaan peran swasta dan masyarakat dalam pencegahan bencana, pengendalian banjir dan pemanfaatan sumber daya air
5. Regulasi, mekanisme pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya air yang harmonis di wilayah JABODETABEK dan PUNJUR
6. Manajemen kelembagaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya air di wilayah JABODETABEK dan PUNJUR
7. Rencana mobilisasi pendanaan untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.

RENCANA TINDAK JANGKA PANJANG: PENATAAN RUANG WILAYAH JABODETABEK PUNJUR

Beberapa rencana kerja mendesak dan berjangka menengah sampai panjang yang perlu dilakukan, perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. DKI Jakarta meliputi areal seluas 650 km² dengan evaluasi antara +0,8 m s.d. + 25 m, dimana 40% wilayahnya merupakan daerah rendah yang rawan banjir. Jakarta mempunyai 13 sungai besar dan kecil yang sering menimbulkan bencana banjir di musim hujan. Terjadinya banjir di Jakarta, pada dasarnya disebabkan oleh :

- luapan air sungai karena aliran banjir melebihi kapasitas alirannya sebagai akibat dari tingginya curah hujan dan relatif landainya kemiringan sungai;
 - genangan air akibat tidak memadainya prasarana drainase serta makin luasnya areal yang tidak dapat menyerap air;
 - masih dimanfaatkannya bantaran sungai sebagai tempat permukiman oleh sebagian masyarakat;
 - kerusakan lingkungan daerah tangkapan air di bagian hulu sungai akibat pemanfaatan yang kurang terkendali;
 - pembuangan sampah ke sungai/prasarana drainase.
2. Prinsip penanggulangan banjir Jabodetabek secara teknis adalah :
- **memotong aliran sungai** sebelum memasuki kota Jakarta dan mengalirkannya ke laut melalui Banjir Kanal;
 - menyediakan **prasarana drainase perkotaan** dengan memanfaatkan aliran sungai sebagai drainase utama; dan
 - mengembangkan **system polder** pada daerah berelevasi rendah yang dilengkapi dengan waduk penampungan serta pompa penguras.
3. Permasalahan yang menonjol dalam pembangunan prasarana pengendali banjir di Jabodetabek adalah pembebasan tanah dan pemukiman kembali penduduk. Dari total kebutuhan dana sebesar Rp 16,5 triliun untuk penanggulangan banjir Jabodetabek dan sekitarnya sesuai master plan tahun 1997, Rp 4,70 triliun di antaranya digunakan untuk pembebasan tanah. Kegiatan utama yang direncanakan pada master plan tersebut antara lain mencakup :
- Peningkatan kapasitas Banjir Kanal Barat dan Ciliwung Hilir
 - Pembangunan Banjir Kanal Timur
 - Pembangunan waduk di wilayah hulu (Waduk Ciawi, Waduk Parung Badak, dan Waduk Genteng).
4. Kejadian banjir saat ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, namun juga akibat perubahan tata guna lahan yang sangat cepat serta terhambatnya kegiatan penanganan banjir sesuai master plan yang telah direncanakan. Untuk itu dibutuhkan upaya penanganan mendesak yang perlu dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan dukungan dari seluruh masyarakat.
5. Pembangunan banjir kanal timur berjalan sangat lambat terkait dengan hambatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah. Pembebasan tanah yang dimulai sejak tahun 2002, sampai dengan awal tahun 2007 baru terlaksana sepanjang 7 km dari rencana kebutuhan sepanjang 23,5 km sehingga banjir kanal timur belum dapat berfungsi untuk beberapa tahun mendatang.

6. Upaya-upaya yang masih perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan banjir di Jabodetabek dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (a) upaya struktural, dan (b) upaya non-struktural.
7. Upaya Struktural meliputi :
 - **Pemulihan kapasitas sungai/saluran** melalui normalisasi sungai dan pengerukan muara, penataan daerah bantaran sungai agar kapasitas pengalirannya tidak berkurang, peningkatan kapasitas pengaliran banjir kanal barat, dan melanjutkan pembangunan banjir kanal timur;
 - **Konservasi sumber daya air** di daerah tangkapan air baik melalui revegetasi maupun pembangunan *check dam*, situ, waduk retensi, dan sumur resapan.
 - **Perencanaan upaya terobosan** melalui pembangunan tunnel drainase bawah tanah
8. Upaya Non-Struktural meliputi :
 - **Pembenahan dan penataan daerah tangkapan air** di hulu Kali Ciliwung, serta ke-12 sungai lainnya. Pembetulan dan penataan tersebut antara lain akan dilaksanakan melalui **pengaturan kembali tata ruang** wilayah Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur);
 - **Penyempurnaan rencana tata ruang Jakarta** yang lebih memperhatikan aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan sumber daya air;
 - **Inventarisasi dan persiapan pembangunan waduk-waduk pengendali banjir** yang diperlukan;
 - **Penyempurnaan sistem penanganan sampah** untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke sungai maupun saluran drainase;
 - **Penegakan hukum** dengan mengenakan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar peraturan perundangan yang terkait dengan penanggulangan banjir.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pendayagunaan tata ruang wilayah Jabodetabek Punjur, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat PP 47 tahun 1997 ataupun juga di dalam RPP revisinya, status hukum penataan ruang kawasan tertentu adalah Keputusan Presiden. Demikian juga dengan wilayah Jabodetabek-punjur ini. Dewasa ini status hukum penataan ruang Jabodetabek–punjur sedang disiapkan menjadi peraturan presiden (Perpres). Prosesnya sampai saat ini memang belum selesai (masih berstatus Rancangan Perpres).
2. Materi penataan ruang dalam Raperpres Jabodetabek-Punjur ini sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari pemikiran penataan ruang yang tertuang sudah cukup lama, yaitu dari Keppres 114 tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Kawasan Bopunjur).

3. Oleh karena disadari bahwa Kawasan Bopunjur pada hakekatnya merupakan satu kesatuan ekosistem dengan Jabodetabek, maka dalam Raperpres yang bersangkutan dua wilayah tersebut disatukan.
4. Di samping adanya kepentingan untuk memadukan perencanaan tata ruang bagi suatu wilayah yang sangat strategis secara nasional ini, langkah ini kami pandang sangat penting dan urgen karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah ini sudah sangat kritis dewasa ini. Masalah banjir periodik di wilayah Jakarta, termasuk yang sangat luar biasa di awal bulan Februari 2007 ini, menjadi bukti yang tidak bisa dielakkan lagi.
5. Sesuai dengan rumusan Raperpres Jabodetabek-Punjur, tujuan utama dari penataan wilayah ini adalah mengembalikan fungsi lingkungan hidup terutama di kawasan-kawasan hulu (Bopunjur) untuk menjaga keseimbangan tata air seluruh wilayah, khususnya wilayah tengah dan hilir (Jabodetabek).
6. Proses penetapan Raperpres ini memang cukup lama karena harus menampung berbagai kepentingan dari tingkat pemerintahan tingkat kabupaten/kota yang terlibat di dalamnya.
7. Diharapkan dengan adanya permasalahan banjir yang dialami pada bulan Februari 2007, percepatan dari proses penetapan Raperpres ini dapat segera dilakukan. Karena, dengan adanya penataan ruang yang status hukumnya cukup kuat ini dan sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait, berbagai hal yang lebih teknis dapat dilakukan lebih tertata dan terencana. Kerjasama antar wilayah terkait di dalam pengendalian banjir sebagaimana telah dimulai dengan disusunnya nota kesepakatan pengendalian banjir Jakarta dan sekitarnya sejak 2002 lalu, akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Demikian pula dengan berbagai bentuk kerjasama dalam bidang-bidang lain seperti pelayanan angkutan umum, sampah, dan lain sebagainya.

LAMPIRAN

TABEL LAMPIRAN
INVENTARISASI KERUSAKAN DAN KERUGIAN BENCANA BANJIR
JABODETABEK, FEBRUARI 2007

| Sektor/Sub Sektor | Jenis Kerusakan | Data Kerusakan | | Satuan | | Prakiraan Kerugian (Rp Juta) | Keterangan | Instansi Terkait |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|----------|------------------------------|------------|---|
| | | Jumlah | Satuan | Harga (Juta Rp) | Unit | | | |
| PERUMAHAN | | | | | | | | |
| 1. | Perumahan | A Perumahan | | | | | | |
| | | Hilang | 14,574 | unit | 10.00 | unit | 145,740.00 | Jabodetabek |
| | | Rusak Berat | 21,861 | unit | 20.00 | unit | 437,220.00 | Jabodetabek |
| | | Rusak Ringan | 109,307 | unit | 5.00 | unit | 546,535.00 | Jabodetabek |
| | | B Prasarana Lingkungan | | | | | 169,424.25 | Asumsi kerusakan PLP 15% dari total nilai kerusakan rumah |
| INFRASTRUKTUR | | | | | | | | |
| 1. | Transportasi Darat | Jalan dan Jembatan | | | | | | |
| | | 1. Jalan | | | | | | |
| | | Rusak Berat | 354,050 | m2 | | | 30,000.00 | Dep. PU (data masuk 120207) |
| | | | 17.70 | km | 2,263.43 | km | 40,062.71 | Kab. Tangerang Din. Bina Marga Kab. (120207) |
| | | | 761 | m2 | | | | Kab. Bogor Pemprov. Jabar (data 120207) |
| | | | 98 | ruas | 50 | | 4,900 | Pemkab. Bekasi (130207) |
| | | | 2,055 | m2 | 0.27 | m2 | 548.69 | bantuan 274 juta Pemkot. Bogor (130207) |
| | | | 2 | ruas | | | 410.00 | kota depok Bappeda Kota Depok (140207) |
| | | Rusak Ringan | 11,615 | m2 | | | | Dep. PU (data masuk 120207) |
| | | | 1,030,609 | m2 | 0.165 | m2 | 170,050.49 | 5 wilayah DKI Jakarta Din. PU DKI Jakarta (130207) |
| | | | 1 | ruas | 30.00 | | 30.00 | kota depok Bappeda Kota Depok (140207) |
| | | 2 Jembatan | | | | | | |
| | | Rusak Berat | 5 | unit | 210.00 | unit | 1,050.00 | Kab. Tangerang Din. Bina Marga Kab. (120207) |
| | | | 4 | unit | | | | Kab. Bogor Pemprov. Jabar (data 120207) |
| | | | 2 | unit | | | | Pemkab. Bekasi (130207) |
| | | | 3 | unit | 150.00 | unit | 450.00 | bantuan 225 juta Pemkot. Bogor (130207) |
| | | | 1 | unit | | | 485.00 | kota depok Bappeda Kota Depok (140207) |
| | | Rusak Ringan | 2 | unit | 8.00 | m2 | 6,440.00 | 805m2 Din. PU DKI Jakarta (130207) |
| | | | 1 | unit | 15.00 | | 15.00 | kota depok Bappeda Kota Depok (140207) |
| | | Jembatan gantung | | | | | | |
| | | Rusak Berat | 2 | unit | 75.00 | unit | 150.00 | kota depok Bappeda Kota Depok (140207) |
| | | | 1 | unit | 18.00 | m2 | 2,430.00 | 135m2 Din. PU DKI Jakarta (130207) |
| | | 3 Kereta Api | | | | Rp/Hari | 9,240.00 | selama 6 hari Dephub/PT. KAI (data masuk 100207) |
| | | Rel | 6 | lokasi | | | 1,650.00 | |
| | | Stasiun (Dipo) | 3 | unit | | | 11,088.00 | |

| Sektor/Sub Sektor | Jenis Kerusakan | Data Kerusakan | | Satuan | | Prakiraan Kerugian (Rp Juta) | Keterangan | Instansi Terkait |
|-------------------|--|----------------|-------------|-----------------|------|------------------------------|----------------------------|---|
| | | Jumlah | Satuan | Harga (Juta Rp) | Unit | | | |
| | Kereta | 18 | unit | | | 990.00 | | |
| | Peralatan sinyal kereta | 3 | lokasi | | | 400.00 | | |
| | 4 Jalan Tol | | | | | 1,000.00 | Jasa Marga (2 hari) | Dephub/DPU/Jasa Marga |
| | 5 Moda transportasi darat | | | | | 300,000.00 | | Organda |
| | 6 Jalur Busway | 1 | paket | | | 20,000.00 | 5 wilayah DKI Jakarta | Din.PU DKI Jakarta (130207) |
| 2. Energi | A SPBU | 11 | unit | | | | | Pertamina/ESDM |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | Rusak Ringan | | | | | | | |
| | Depo BBM | | | | | 100,000.00 | plumpang (4hari) | |
| | B Listrik | | | | | 75,600.00 | Kerugian PT.PLN selama 7 h | PT. PLN (140207) |
| | 1. Jaringan Utama | | | | | | | |
| | A. GARDU INDUK (GI) | | | | | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | GI Gambir Baru | | | | | | | |
| | CVT | 3 | buah | 120.00 | | 360.00 | Energy Loss oportuntuy | PLN Region Jakarta & Banten (140207) |
| | Battery 110 V | 2 | set | 200.00 | | 400.00 | 120,000 Mwh setara 75.6 | |
| | Battery 48 V | 1 | set | 60.00 | | 60.00 | Milyar rupiah | |
| | Rectifier 110 V | 2 | set | 90.00 | | 180.00 | | |
| | Rectifier 48 V | 1 | set | 50.00 | | 50.00 | | |
| | Konduktor incoming 1000mm2 | 2 | set | 27.50 | | 55.00 | | |
| | Pagar Pengaman | 80 | meter | 5.00 | | 400.00 | | |
| | GI Pulogadung | | | | | | | |
| | Pompa air | 1 | set | 10.00 | | 10.00 | | |
| | GI Pangeran Karang | | | | | | | |
| | Mekanik PMT | 1 | set | 300.00 | | 300.00 | | |
| | GI Penggilingan | | | | | | | |
| | Pompa Fire Protection | 1 | set | 50.00 | | 50.00 | | |
| | Rusak Ringan | | | | | | | PLN Region Jabar (140207) |
| | Pompa air di GI Tegal Herang, GI Rengas Dengklok, GI Teluk Jambe & GI Maligi | 5 | set | 5.00 | 5.00 | 25.00 | | Beli pompa & selang serta biaya pasang (140207) |
| | B. JARINGAN DISTRIBUSI | | | | | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | SUTM | 11 | gawang | 2.00 | | 22.00 | | PLN DISJABAR (140207) |
| | SKTM 3 x 240 mm2 | 1,500 | meter | 0.27 | | 405.00 | | PLN Disjaya (140207) |
| | SKTM Jointing | 6 | buah | 3.11 | | 18.68 | | |
| | Rusak Ringan | | | | | | | |

| Sektor/Sub Sektor | Jenis Kerusakan | Data Kerusakan | | Satuan | | Prakiraan Kerugian (Rp Juta) | Keterangan | Instansi Terkait |
|-------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------|------|------------------------------|---|-----------------------------|
| | | Jumlah | Satuan | Harga (Juta Rp) | Unit | | | |
| | 2. Gardu Distribusi | | | | | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | MV Cell : | | buah | | | | | PLN DISJAYA (140207) |
| | PGDB | 42 | buah | 143.85 | | 6,041.70 | | |
| | LBS/PMS | 128 | buah | 56.40 | | 7,219.20 | | |
| | PB | 46 | buah | 29.30 | | 1,347.80 | | |
| | RMU | 34 | buah | 56.47 | | 1,919.81 | | |
| | Fuse TM | 71 | buah | 8.00 | | 568.00 | | |
| | TRAFO : | | | | | | | |
| | 250 kVA | 2 | buah | 28.83 | | 57.66 | | |
| | 315 kVA | 9 | buah | 47.37 | | 426.33 | | |
| | 400 kVA | 13 | buah | 52.13 | | 677.63 | | |
| | 830 kVA | 9 | buah | 77.99 | | 701.91 | | |
| | RakTR | 47 | buah | 10.45 | | 491.15 | | |
| | JTR/SR/APP : | | | | | | | |
| | Opstyg | 500 | meter | 0.34 | | 169.00 | | |
| | JTR | 1,000 | meter | 0.03 | | 32.96 | | |
| | APP | 2,500 | buah | 0.17 | | 425.01 | | |
| | Rusak Ringan | 142 | bh | 2.50 | | 355.00 | | PLN DISJABAR (140207) |
| | 3 Sambungan Rumah | | | | | | | |
| 3. | Pos dan Telekomunikasi | A | Telkom | | | 18,000.00 | | PT.Telkom/Depkominfo |
| | 1 Jaringan Utama | | | | | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | Rusak Ringan | | | | | | | |
| | 2 Sambungan Telepon | 76,000 | SST | | | | 90% sudah normal | |
| 4. | Air dan Sanitasi | A | PDAM | | | | | DPU |
| | 1 Instalasi Air Bersih | | | | | | | |
| | Rusak Berat | 1 | unit | | | 4,000.00 | Bogor, alat dan pendapatan | |
| | Rusak Ringan | 6 | Unit | 250.00 | unit | 1,500.00 | a. IPA Pejompongan I b. IPA Pejompongan II c. IPA Pulogadung d. IPA Buaran e. IPA Cilandak f. Bulk Water dari Cisadane - Tangerang | Dep. PU (data masuk 120207) |
| | 2 Pompa | 14 | Unit | 300.00 | unit | 4,200.00 | | Dep. PU (data masuk 120207) |
| | 3 Genset | 14 | Unit | 300.00 | Unit | 4,200.00 | | Dep. PU (data masuk 120207) |

| Sektor/Sub Sektor | Jenis Kerusakan | Data Kerusakan | | Satuan | | Prakiraan Kerugian (Rp Juta) | Keterangan | Instansi Terkait |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------|--|
| | | Jumlah | Satuan | Harga (Juta Rp) | Unit | | | |
| | 4 Peralatan Pendukung SR/MTA | 1 | Ls | 500.00 | 7 unit | 3,500.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| 5. Infrastruktur Pertanian | A Irigasi Teknis | | | | | | | Deptan/DPU |
| | Rusak Berat | 606 | m | | | 60.00 | DKI Jakarta | Deptan (150207) |
| | | 4,930 | m | | | 891.80 | kab.bogor | Deptan (150207) |
| | | 350 | m | 0.75 | | 262.50 | kota bogor | Deptan (150207) |
| | | 8.5 | km | 300.00 | km | 2,550.00 | Kab. Tangerang | Din. Bina Marga Kab. (120207) |
| | Rusak Ringan | 2.4 | km | 500.00 | km | 1,200.00 | Kab. Tangerang | Din. Bina Marga Kab. (120207) |
| | | 5 | titik | 16.00 | | 80.00 | kota depok | Bappeda Kota Depok (140207) |
| | B Irigasi Non Teknis | | | | | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | Rusak Ringan | 5 | titik | 16.00 | | 80.00 | kota depok | Bappeda Kota Depok (140207) |
| | C Irigasi Sederhana | | | | | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | Rusak Ringan | 1 | titik | 20.00 | | 20.00 | kota depok | Bappeda Kota Depok (140207) |
| 6. Pintu Air | | 17 | Unit | 7.76 | unit | 131.92 | Kali Bekasi | Dep PU/Pemda (data masuk 120207) |
| | | 9 | unit | 60.00 | unit | 540.00 | Kab. Tangerang | Din. Bina Marga Kab. (120207) |
| 7. Sungai | | | | | | | | |
| | Tanggul | | | | | | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | K. Bekasi/Cileungsi/Cikeas | 4,900 | m' | 0.40 | m' | 1,960.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | Kali Cipinang | 8,000 | m' | 0.40 | m' | 3,200.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | Kali Sunter | 6,000 | m' | 0.40 | m' | 2,400.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | Kali Buaran | 3,500 | m' | 0.40 | m' | 1,400.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | Kali Pesanggrahan/K. Tengah | 640 | m' | 0.40 | m' | 256.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | Kali Angke | 600 | m' | 0.40 | m' | 240.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | Banjir Kanal Barat | 3,100 | m' | 0.40 | m' | 1,240.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | Kali Krukut | 150 | m' | 0.40 | m' | 60.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | Kali Ciliwung | 500 | m' | 0.40 | m' | 200.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | Kali Sasak Jarang | 1,200 | m' | 0.40 | m' | 480.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | Kali Jati Kramat | 1,500 | m' | 0.40 | m' | 600.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | Kali Cakung | 2,000 | m' | 0.40 | m' | 800.00 | | Dep. PU (data masuk 150207) |
| | | 922 | m | | | | Kab.Bogor | Pemprov.Jabar (120207) |
| SEKTOR SOSIAL | | | | | | | | |
| 1. Kesehatan | A. Puskesmas | 28 | unit | 5.00 | Rp/unit | 140.00 | terendam | Depkes/Dit.Kes&Gizi Bappenas (1302) |
| | Bangunan | | | | | | | |

| Sektor/Sub Sektor | Jenis Kerusakan | Data Kerusakan | | Satuan | | Prakiraan Kerugian (Rp Juta) | Keterangan | Instansi Terkait |
|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | Jumlah | Satuan | Harga (Juta Rp) | Unit | | | |
| | Rusak Berat | 1 | unit | 35.00 | | 35.00 | kota depok | Bappeda Kota Depok (140207) |
| | Rusak Ringan | | | | | | | |
| | Peralatan | | | | | | | |
| | Hilang | | | | | | | |
| | Rusak | | | | | | | |
| | B. Puskesmas Pembantu | 4 | unit | | | | (kab.bekasi) terendam | Depkes/Dit.Kes&Gizi Bappenas (1302) |
| | B. Rumah Sakit | | | | | | | |
| | C Pusat Pelayanan Terpadu | | | | | | | |
| 2. | Pendidikan | 276 | unit | | | | | Depdiknas |
| | A. TK dan Sederajat Bangunan | | | | | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | Rusak Ringan | | | | | | | |
| | Terendam | 15 | unit | 20 | | 300.00 | | Pemkab.Bekasi (130207) |
| | Peralatan | | | | | | | |
| | Hilang | | | | | | | |
| | Rusak | | | | | | | |
| | B. SD dan Sederajat Bangunan | | | | | | | |
| | Rusak Berat | 3 | unit | | | | Kab.Bogor | Pemprov.Jabar (120207) |
| | | 2 | unit | 350.00 | | 700.00 | | Pemkab.Bekasi (130207) |
| | | 5 | unit | 474.16 | unit | 2,370.80 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |
| | Rusak Ringan | 1 | unit | 20.00 | unit | 20.00 | bantuan 10 juta | Pemkot.Bogor (130207) |
| | | 51 | unit | 20.00 | unit | 1,020.00 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |
| | | 1 | unit | | | | SDN Pangkal Jati Baru | Bappeda Kota Depok (140207) |
| | Terendam | 161 | unit | 20.00 | unit | 3,220.00 | | Pemkab.Bekasi (130207) |
| | Peralatan | | | | | | | |
| | Meubelair | 2,100 | set | 0.30 | set | 630.00 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |
| | Buku | 10,221 | buah | | buah | 145.65 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |
| | Komputer | 4 | unit | 3.00 | unit | 12.00 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |
| | C. SMP dan Sederajat Bangunan | | | | | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | Rusak Ringan | 1 | unit | 30 | | 30.00 | | Pemkab.Bekasi (130207) |
| | | 9 | unit | 20.00 | unit | 180.00 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |

| Sektor/Sub Sektor | Jenis Kerusakan | Data Kerusakan | | Satuan | | Prakiraan Kerugian (Rp Juta) | Keterangan | Instansi Terkait |
|-------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------------|------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Jumlah | Satuan | Harga (Juta Rp) | Unit | | | |
| | Terendam | 12 | unit | 20 | | 240.00 | | Pemkab.Bekasi (130207) |
| | Peralatan | | | | | | | |
| | Meubelair | 144 | set | 0.30 | set | 43.20 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |
| | Buku | 216 | buah | | buah | 3.08 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |
| | Komputer | | | | | | | |
| | D SMA dan Sederajat | | | | | | | |
| | Bangunan | | | | | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | Rusak Ringan | 3 | unit | 30.00 | | 90.00 | | Pemkab.Bekasi (130207) |
| | | 4 | unit | 20.00 | unit | 80.00 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |
| | Terendam | 8 | unit | 20.00 | | 160.00 | | Pemkab.Bekasi (130207) |
| | Peralatan | | | | | | | |
| | Meubelair | 154 | set | 0.30 | set | 46.20 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |
| | Buku | 466 | buah | | buah | 6.64 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |
| | Komputer | 22 | unit | 3.00 | unit | 66.00 | Kab.Tangerang | Din.Pendidikan Kab. (120207) |
| 3. Agama | A. Mesjid | | | | | | | Depag |
| | Bangunan | | | | | | | |
| | Rusak Berat | 2 | unit | | | | Kota Depok | Pemprov.Jabar (120207) |
| | | 1 | unit | 50.00 | unit | 50.00 | bantuan 25 juta | Pemkot.Bogor (130207) |
| | Rusak Ringan | 1 | unit | 10.00 | unit | 10.00 | bantuan 5 juta | Pemkot.Bogor (130207) |
| | | 1 | unit | | | 2.00 | kota depok | Bappeda Kota Depok (140207) |
| | | 227 | unit | 15.00 | unit | 3,405.00 | DKI Jakarta | Kanwil Depag/Depag (150207) |
| | Peralatan | | | | | | | |
| | Hilang | | | | | | | |
| | Rusak | | | | | | | |
| | B. Musholla/Surau/Langgar | 3 | unit | | | | Kab.Bogor | Pemprov.Jabar (120207) |
| | Rusak Berat | 1 | unit | 10.00 | unit | 10.00 | bantuan 5 juta | Pemkot.Bogor (130207) |
| | | 2 | unit | | | 21.00 | kota depok | Bappeda Kota Depok (140207) |
| | Rusak Ringan | | | | | | | |
| | C Gereja | | | | | | | |
| | Bangunan | | | | | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | Rusak Ringan | | | | | | | |
| | Peralatan | | | | | | | |
| | Hilang | | | | | | | |
| | Rusak | | | | | | | |

| Sektor/Sub Sektor | Jenis Kerusakan | Data Kerusakan | | Satuan | | Prakiraan Kerugian (Rp Juta) | Keterangan | Instansi Terkait |
|--------------------------|----------------------------|----------------|--------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | Jumlah | Satuan | Harga (Juta Rp) | Unit | | | |
| | D Lembaga Sosial Keagamaan | 82 | unit | 13.5 | unit | 1,107.00 | | Kanwil Depag DKI Jakarta (150207) |
| | E Pesantren | | | | | | | |
| | Rusak Berat | 1 | unit | 250.00 | | 250.00 | kota depok | Bappeda Kota Depok (140207) |
| | F Madrasah | | | | | | | Dep. Agama (150207) |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | Gedung Kantor | 1 | unit | 72.00 | unit | 72.00 | | Kanwil depag Prov. Banten |
| | Ruang Kelas/Belajar | | | | | | | |
| | Ruang TU | | | | | | | |
| | Ruang Laboratorium | 1 | unit | 72.00 | unit | 72.00 | | Kanwil depag Prov. Banten |
| | Ruang Perpustakaan | 1 | unit | 72.00 | unit | 72.00 | | Kanwil depag Prov. Banten |
| | Meubelair | 1,302 | unit | 0.18 | unit | 234.36 | | Kanwil depag Prov. Banten |
| | Rusak Ringan | | | | | | | |
| | Gedung Kantor | 225 | unit | 12.50 | unit | 2,812.50 | | Kanwil Depag DKI Jakarta |
| | | 2 | unit | 45.00 | unit | 90.00 | | Kanwil depag Prov. Banten |
| | Ruang Kelas/Belajar | 225 | unit | 4.50 | unit | 1,012.50 | | Kanwil Depag DKI Jakarta |
| | | 31 | RK | 30.00 | | 930.00 | | Kanwil depag Prov. Banten |
| | Ruang TU | 225 | unit | 15.00 | unit | 3,375.00 | | Kanwil Depag DKI Jakarta |
| | Ruang Laboratorium | 200 | unit | 7.50 | unit | 1,500.00 | | Kanwil Depag DKI Jakarta |
| | Ruang Perpustakaan | 200 | unit | 6.50 | unit | 1,300.00 | | Kanwil Depag DKI Jakarta |
| | Meubelair | 7,200 | unit | 2.50 | unit | 18,000.00 | | Kanwil Depag DKI Jakarta |
| 4. Lembaga Sosial | | | | | | | | |
| | A. Panti Sosial | | | | | | | |
| | Bangunan | | | | | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | Rusak Sedang | 3 | unit | 50.00 | unit | 150.00 | panti anak, cacat tubuh, mental | Din.Sos DKI/Dep.Sos (150207) |
| | Rusak Ringan | | | | | | | |
| | Peralatan dan Perlengkapan | 1 | paket | | | 18.00 | | Din.Sos DKI/Dep.Sos (150207) |
| SEKTOR EKONOMI | | | | | | 2,000,000.00 | | |
| 1. Pertanian | A. Lahan Produktif | | | | | | | |
| | Hilang | 1,067 | ha | 0.0041 | dikali 25kg/ha | 109.37 | Kab.Tangerang | Dep.Pertanian (130207) |
| | | 6,972 | ha | 0.0041 | dikali 25kg/ha | 714.63 | Kab.Bekasi | Dep.Pertanian (150207) |
| | Rusak | | | | | | | |
| | | 103 | ha | 0.0041 | | 10.56 | kab.bogor | Dep.Pertanian (150207) |
| | | 18,144 | ha | | | 1,859.76 | kab.bekasi | Dep.Pertanian (150207) |
| | | 3,723 | ha | 0.0041 | | 382.53 | Kab.Tangerang | Dep.Pertanian (150207) |
| | | 6 | ha | 3.00 | | 18.00 | kota depok | Bappeda Kota Depok (140207) |
| | Tanaman Pangan | 2,100 | ha | | | 3,000.00 | 2600 UKM/Petani Bekasi | Men. KUKM (data masuk 140207) |
| | Gagal Panen | 641 | ha | 12.50 | ha | 8,012.50 | Kab.Tangerang | Din.Pertanian & Peternakan (120207) |

| Sektor/Sub Sektor | Jenis Kerusakan | Data Kerusakan | | Satuan | | Prakiraan Kerugian (Rp Juta) | Keterangan | Instansi Terkait |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | Jumlah | Satuan | Harga (Juta Rp) | Unit | | | |
| | B. Mesin, Alat, dan Perlengkapan | | | | | | | |
| | Hilang | | | | | | | |
| | Rusak | | | | | | | |
| | C Ternak | | | | | | | |
| | Sapi | | | | | | | |
| | Ayam/Itik | 378,966 | ekor | 0.035 | | 13,263.81 | kab.Bekasi | Dis.Peternakan Kab. (150207) |
| | Kambing/Domba | 1,259 | ekor | 0.50 | | 629.50 | kab.Bekasi | Dis.Peternakan Kab. (150207) |
| | D Perikanan | 1 | paket | | | 710.13 | kolam,tambak,empang | Bappeda Kota Depok (140207) |
| | Tambak | 9,243 | ha | 0.909 | | 8,400.00 | | Pemkab.Bekasi (130207) |
| | | 794.40 | ha | 1.50 | ha | 1,191.60 | Kab.Tangerang | Perikanan & Kelautan Kab.(120207) |
| | | 150 | ha | | | 5,500.00 | 102 UKM Bekasi | Men. KUKM (data masuk 140207) |
| | Empang | 14 | ha | 1.35 | ha | 18.90 | Kab. Tangerang | Perikanan & Kelautan Kab.(120207) |
| | Kolam | 106.00 | ha | 2 | | 212.00 | | Pemkab.Bekasi (130207) |
| 2. | Jenis Perdagangan | A Pasar Tradisional | | | | | | |
| | | Bangunan dan Kios | | | | | | |
| | | Rusak Berat | 1 | unit | | 200.00 | Kab.Bekasi | Dep.Perdagangan (150207) |
| | | Rusak Ringan | 1 | unit | | 170.11 | kota Tangerang | Dep.Perdagangan (150207) |
| | | | 1 | unit | | 650.00 | (+200 pedagang) kt.bogor | Dep.Perdagangan (150207) |
| | | Pedagang | 6,012 | Pedagang | | 61,247.51 | 5 wilayah DKI jakarta | Dep.Perdagangan (150207) |
| | | B Jasa Pelayanan Lainnya | | | | | | |
| | | Bangunan | | | | | | |
| | | Rusak Berat | | | | | | |
| | | Rusak Ringan | | | | | | |
| 3. | Pariwisata | A Fasilitas | | | | | | Depbudpar |
| | | Bangunan | | | | | | |
| | | Rusak Berat | | | | | | |
| | | Rusak Ringan | | | | | | |
| | | B Sarana Wisata | | | | | | |
| | | Rusak Berat | | | | | | |
| | | Rusak Ringan | | | | | | |
| | | C Hotel | | | | | | |
| | | Rusak Berat | | | | | | |
| | | Rusak Ringan | | | | | | |
| | | D Restoran | | | | | | |
| | | Rusak Berat | | | | | | |
| | | Rusak Ringan | | | | | | |
| 4. | Industri | A Industri Besar | 23 | unit | | | Jabodetabek | Deperin |
| | | B Industri Kecil Menengah | | | | | | |

| Sektor/Sub Sektor | Jenis Kerusakan | Data Kerusakan | | Satuan | | Prakiraan Kerugian (Rp Juta) | Keterangan | Instansi Terkait |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|-----------------|--------|------------------------------|---|---------------------------------|
| | | Jumlah | Satuan | Harga (Juta Rp) | Unit | | | |
| | | 75 | buah | 134.00 | buah | 10,050.00 | Kab.Tangerang | Din.Perindustrian Kab.(120207) |
| | Tekstil | 560 | unit | | | | | |
| | Meubel dan Furniture | 2,100 | unit | | | | 24 sentra industri | |
| | Industri, Perdagangan, jasa | | | | | 3,600.00 | 530 UKM Bekasi | Men. KUKM (data masuk 140207) |
| | C PKL | | | | | | | Men. KUKM (data masuk 120207) |
| | Sarana Usaha | 16,240 | orang | | | 285.80 | 5 wilayah DKI | Men. KUKM (data masuk 120207) |
| | Stok Barang | | | | | 244.45 | 5 wilayah DKI | Men. KUKM (data masuk 120207) |
| | Kehilangan Pendapatan | | | | | | | Men. KUKM (data masuk 120207) |
| | Usaha Mikro/PKL | | | | 7 hari | 46,000.00 | 5 wilayah DKI | Men. KUKM (data masuk 130207) |
| | Usaha Kecil | | | | 7 hari | 421,000.00 | 5 wilayah DKI | Men. KUKM (data masuk 130207) |
| | Usaha Menengah | | | | 7 hari | 308,000.00 | 5 wilayah DKI | Men. KUKM (data masuk 130207) |
| SEKTOR LAINNYA | | | | | | | | |
| 1. Pemerintahan | A Kantor Pemerintahan | | | | | | | Depdagri |
| | Rusak Berat | 2 | unit | | | | Kab.Bogor | Pemprov.Jabar (120207) |
| | Rusak Ringan | 1 | unit | | | | Kantor RW | Bappeda Kola Depok (140207) |
| | Peralatan | | | | | | | |
| | Rusak | | | | | | | |
| | Hilang | | | | | | | |
| | B Gedung KUA | | | | | | | Dep. Agama (150207) |
| | | 10 | unit | 20 | unit | 200.00 | | Kanwil Depag DKI Jakarta |
| | Rusak Berat | 1 | unit | 118 | | 118.00 | | Kanwil depag Prov. Banten |
| | Rusak Ringan | 3 | unit | 0.045 | | 0.14 | | Kanwil depag Prov. Banten |
| 2. Sektor Keuangan/Perbankan | | | | | | | | B.I. |
| | A Perbankan | | | | | 12,600 | mandiri & BNI | |
| | KC | 32 | unit | | | | Kerusakan meliputi gangguan komunikasi dan suplai listrik. hingga dilaporkan, sebagian besar sudah dapat teratasi | Bank Indonesia (150207) |
| | KCP | 239 | unit | | | | | Bank Indonesia (150207) |
| | KK | 170 | unit | | | | | Bank Indonesia (150207) |
| | PP | 3 | unit | | | | | Bank Indonesia (150207) |
| | ATM | 556 | unit | | | | | Bank Indonesia (150207) |
| | B Asuransi | | | | | 3,600,000 | | |
| | C Koperasi | | | | | | | |
| | Sarana Usaha | 60 | unit | | | 6,000.00 | 5 wilayah DKI | Men. KUKM (data masuk 130207) |
| | | 97 | koperasi | | | 2,000.00 | Bekasi | Men. KUKM (data masuk 140207) |
| 3. Ketertiban dan Keamanan | | | | | | | | |
| | A POLRI | | | | | 4,304.00 | | Mabes POLRI (data masuk 120207) |
| | Asrama Polri | 4 | unit | | | | | |
| | Rumah Dinas | 145 | unit | | | | | |
| | Kantor | 21 | unit | | | | | |

| Sektor/Sub Sektor | Jenis Kerusakan | Data Kerusakan | | Satuan | | Prakiraan Kerugian (Rp Juta) | Keterangan | Instansi Terkait |
|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|------|---------------------------------|------------|--------------------------|
| | | Jumlah | Satuan | Harga (Juta Rp) | Unit | | | |
| | Rusak Berat | | | | | | | |
| | Rusak Ringan | | | | | | | |
| | Peralatan | 85 | paket | | | | | |
| | Rusak | | | | | | | |
| | Hilang | | | | | | | |
| | B Mabes TNI | 1 | Paket | | | 3,061.14 | | Dep. Pertahanan (150207) |
| | C TNI AD | 1 | Paket | | | 27,232.92 | | Dep. Pertahanan (150207) |
| | D TNI AL | 1 | Paket | | | 13,146.77 | | Dep. Pertahanan (150207) |
| | E TNI AU | 1 | Paket | | | 15,041.17 | | Dep. Pertahanan (150207) |
| | F Dep. Han | 1 | Paket | | | 3,748.76 | | Dep. Pertahanan (150207) |
| | TOTAL | | | | | 8,779,696.17 | | |
| | Minus 3,6 T | | | | | 5,179,696.17 | | |